

**ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN MINAPOLITAN UNTUK
PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH UTARA KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat

Memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE)

Program studi Ekonomi Pembangunan



Oleh

Nama : Fahmi Irham

NPM : 1505180068

Program studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

MEDAN

2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : FAHMI IRHAM
NPM : 1505180068
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN MINAPOLITAN UNTUK PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH UTARA KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dra. Hj. LAILAN SAFINA, M.Si)

Penguji II

(HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si)

Pembimbing

(Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : FAHMI IRHAM
N.P.M : 1505180068
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN MINAPOLITAN
UNTUK PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH UTARA
KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. L. ANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : FAHMI IRHAM
N.P.M : 1505180068
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN MINAPOLITAN UNTUK PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH UTARA KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
13/8-2019	- Konsultasi kuesioner, semesta dengan def. variabel dan variabel terikat (garis kalatung)		
1/10-2019	- Jabra kuesioner, semesta dengan sampel dan proporsi.		
3/10-2019	- Olati data kuesioner - Analisis data primer & produksi ikan → MPB, → subsektor capaian usaha. Perbaiki semua angka		
4/10-2019	→ Analisis data responden. - Cara umum - Disipiplinika dan praktika dan analisis.		
7/10-2019	- Bab IV → ACC - Bab V → Capaian, SDA - Daftar pustaka, Daftar isi, Abstrak. - Capaian Perbaiki semua angka.		
8/10-2019	- ACC di setiap meja kerja.		

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si

Medan, Oktober 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

**SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FAHMI IRHAM
NPM : 1505180068
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/ skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Oktober 2019
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Konsep pengelolaan minapolitan perikanan tangkap didasarkan pada konsep membangun sistem pengelolaan perikanan tangkap yang berbasis pada kemudahan nelayan bekerja dan memotivasi mereka untuk meningkatkan pendapatan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Kata kunci: *Minapolitan, Nelayan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kesabaran serta kekuatan dan tak lupa Shalawat bernadakan salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: “**Analisis Evaluasi Kebijakan Minapolitan Untuk Perikanan Tangkap Di Kawasan Utara Kota Medan**”, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Orang tua yang saya sayangi ayah saya Ahmar dan Ibu saya Rosmaida beserta kakak saya Risma Yani, serta abang saya Muhammad Alham Dani dan uwo saya nirwah yang telah membantu dalam keuangan saya selama perkuliahan seluruh keluarga yang telah memberi dukungan dan semangatnya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

2. Ibu Dra. Hj. Roswita Hafni.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. PrawidyaHariani RS, Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Roswita Hafni, M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada Sahabat – sahabat seperjuangan, Imam Satrio dan Rahmad Hidayat selaku teman seperjuangan dan sekaligus teman mabar, Salman Nurmauliza dan Novia Lestari yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
10. Kepada seluruh teman – teman dari Ekonomi Pembangunan stambuk 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu - persatu yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada seluruh adik-adik saya di ekonomi pembangunan dari stambuk 2016 sampai 2018 yang tidak biasa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan apabila dalam penulisan terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, Oktober 2019

Penulis

Fahmi Irham

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	18
1.3 Rumusan Dan Batasan Masalah	19
1.4 Tujuan Penelitian.....	19
1.5 Manfaat Penelitian.....	20
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Landasan Teori.....	21
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi	21
2.1.1.1 Teori Klasik.....	23
2.1.1.2 Teori Keynes	27
2.1.2 Teori Ekonomi Regional	30
2.1.2.1 Teori Lokasi Weber.....	31
2.1.2.2 Industri.....	33
2.1.2.3 Tenaga Kerja	33
2.1.2.4 Pemasaran.....	35
2.1.3 Teori Kebijakan Pemerintah.....	36
2.1.3.1 Penyusunan Agenda / Agenda Setting	37
2.1.3.2 Formulasi Kebijakan	38
2.1.3.3 Legimitasi Kebijakan.....	38
2.1.3.4 Implementasi Kebijakan.....	39
2.1.3.5 Evaluasi Kebijakan.....	40
2.1.5 Perencanaan.....	41

2.1.6 Pembangunan Wilayah.....	36
2.2. Penelitian Terdahulu	45
2.3 Kerangka Konseptual	48
BAB III.....	50
METODOLOGI PENELITIAN	50
3.1 Pendekatan Penelitian.....	50
3.2 Defenisi Oprasional.....	50
3.3 Tempat dan waktu penelitian.....	51
3.4 Populasi Dan Sampel.....	52
3.5 Sumber Data	53
3.6 Tehnik Pengumpulan Data.	53
3.7 Teknik Analisis Data	54
BAB IV	55
ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Gambaran Umum Dan Geografis	55
4.1.1 Kondisi Geografis.....	55
4.1.2 Kondisi Topografi Dan Demografis	56
4.2.3 Letak Geografis Kecamatan Medan Belawan	58
4.2 Pembahasan	59
4.2.1 Struktur Ekonomi Kota Medan.	59
4.2.2 Produksi Perikanan Tangkap Kota Medan	61
4.2.3 Deskriptif Objek Penelitian	64
4.2.4 Deskriptif Kegiatan Usaha Nelayan	66
4.2.5 Deskriptif Kebijakan Minapolitan Terhadap Nelayan	72
BAB V.....	78
KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tren Nilai Ekspor Negara Tujuan Utama Periode Januari- November Tahun 2012-2017.....	3
Gambar 1.2	Kawasan Utara Kota Medan	15
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kota Medan	56
Gambar 4.2	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Di Kota Medan.	63
Gambar 4.3	Karakteristik Nelayan Berdasarkan Usia	64
Gambar 4.4	Karakteristik Nelayan Berdasarkan Pendidikan	65
Gambar 4.5	Karakteristik Nelayan Berdasarkan Pengalaman Usaha.....	66
Gambar 4.6	Penghasilan Bersih Rata Rata Nelayan Dalam Satu Bulan....	67
Gambar 4.7	Nelayan Yang Ikut Sampan / Kapal Orang Lain Dan Nelayan Yang Memiliki Sampan / Kapal sendiri.....	68
Gambar 4.8	Nelayan Melaut Dalam 1 bulan.....	69
Gambar 4.9	Lama Melaut Nelayan Dalam Satu Trip.....	70
Gambar 4.10	Menjual Hasil Tangkapan.....	71
Gambar 4.11	Pengetahuan Nelayan Tentang Kejakan Minapolitan.....	72
Gambar 4.12	Penerima bantuan dari pemerintah.....	74
Gambar 4.13	Produktifitas Nelayan	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi dan subsector (ton) 2011-2016.....	8
Tabel 1.2	Penetapan Kawasan Minapolitan Di Sumatera Utara.....	11
Tabel 1.3	Produksi Ikan menurut Asal Tangkapan dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (ton), 2017.....	12
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 3.1	Definisi Operasional.....	51
Tabel 3.2	Waktu Penelitian.....	51
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kota Medan.....	57
Tabel 4.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Medan (juta rupiah), 2013–2018.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terluas peringkat ke-2 di Asia dan merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Perairan laut Indonesia memiliki panjang pantai sampai 95.181 km², dengan luas perairan 5,8 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,3 juta km², perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km², dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km². Luasnya lautan Indonesia sebenarnya membawa keuntungan dan manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia, karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan yang terkandung dilautan sangat berlimpah, sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia.

Wilayah Indonesia yang terbentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT terletak di posisi geografis sangat strategis, karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia. Luas total wilayah Indonesia adalah 7.9 juta km² terdiri dari 1.8 juta km² daratan, 3.2 juta km² laut teritorial dan 2.9 juta km² perairan ZEE. Wilayah perairan 6.1 juta km² tersebut adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, dengan kata lain luas laut Indonesia adalah tiga kali luas daratannya. Dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km serta luas laut sekitar 2,7 juta km² sehingga wilayah pesisir dan lautan

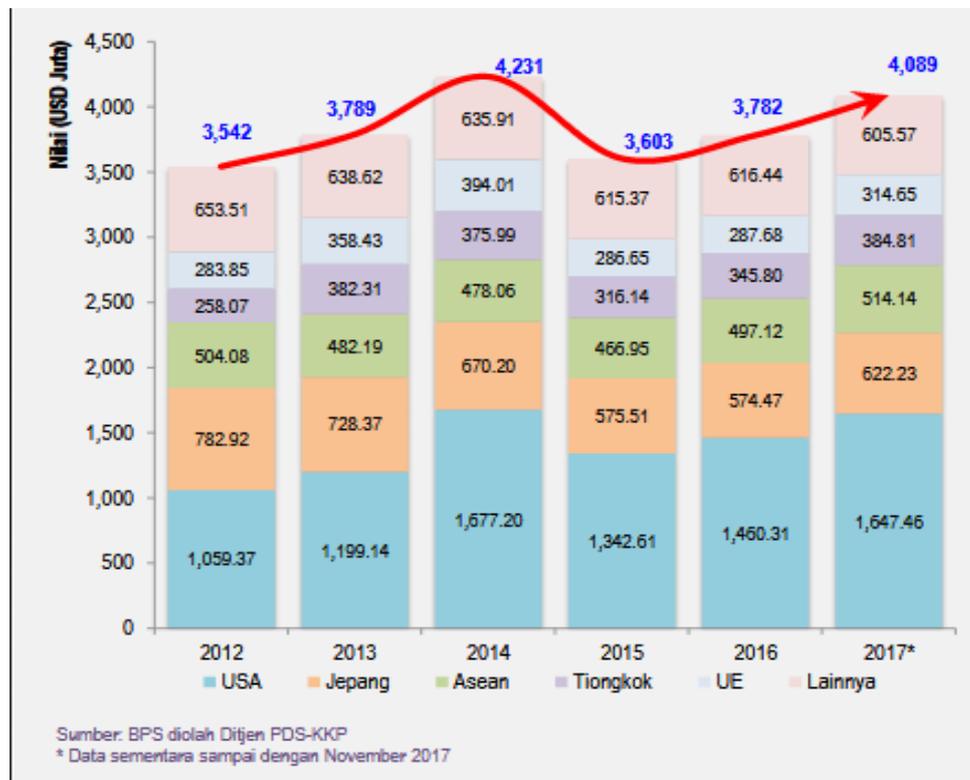
Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar di dunia dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang (*coral reefs*) dan padang lamun (*sea grass beds*).

Sektor perikanan di Indonesia menyumbang 2,5 persen terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Meski masih dalam proporsi yang kecil dibanding industri lainnya, namun porsi sumbangan ini secara tahunan terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Sebelumnya pada periode yang sama pertumbuhan sektor ini adalah 2,4 persen dan pada 2014 tercatat hanya sebesar 2,26 persen. Pertumbuhan sektor perikanan ini terdorong oleh peningkatan produksi hasil tangkapan dan budidaya. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 2011-2016, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia ke berbagai negara tujuan utama meningkat antara lain ke Amerika Serikat naik 11 persen, Cina 14,5 persen dan Uni Eropa naik 4,2 persen. Penurunan ekspor hanya terjadi untuk tujuan Jepang yakni sebesar 7,7 persen. Pertumbuhan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), pada periode Januari – November 2016-2017, nilai ekspor produk perikanan naik 8,12% dari USD3,78 miliar pada 2016 menjadi USD4,09 miliar pada 2017.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di kantor KKP, Kamis (11/1), mengungkapkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KKP akan terus mengupayakan peningkatan produksi dan ekspor produk perikanan Indonesia. Untuk mewujudkannya, penegakan hukum dalam melawan

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing harus tetap digalakan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) juga memaparkan terkait kenaikan neraca perdagangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,42% dari USD.

**Gambar 1.1 Tren Nilai Ekspor Negara Tujuan Utama Periode Januari-
November Tahun 2012-2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik diolah Ditjen PDS-KKP

Pada periode Januari – November 2016-2017 berbagai komoditas kelautan dan perikanan mengalami peningkatan nilai ekspor, di antaranya udang mengalami kenaikan 0,53%, tuna tongkol cakalang (TTC) naik 18,57%, rajungan & kepiting (RK) naik 29,46%, cumi sotong gurita (CSG) naik 16,54%, dan rumput laut (RL) naik 23,35%, sedangkan komoditas lainnya naik 3,61%. Pada periode yang sama, nilai ekspor produk kelautan dan perikanan ke negara tujuan utama

juga menunjukkan peningkatan. Nilai ekspor ke Amerika Serikat naik 12,82%, Jepang naik 8,31%, ASEAN naik 3,42%, Tiongkok naik 11,28%, Uni Eropa naik 9,38%, dan lainnya turun 1,76%. Peningkatan nilai produksi ini diakui Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto ikut berpengaruh pada peningkatan pendapatan pajak dari sektor perikanan. “Pendapatan pajak bersih dari sektor perikanan meningkat dari Rp734 miliar di tahun 2014, menjadi Rp1,082 triliun di tahun 2017 atau meningkat sebesar 47,41%. PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sumber daya perikanan naik dari Rp214,44 miliar di tahun 2014 menjadi Rp 490,23 miliar di tahun 2017, naik 129% atau tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Produksi Perikanan Indonesia sangat melimpah sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan dalam perekonomian nasional. Data Badan Pusat Statistik, tahun 2011 menunjukkan, produksi perikanan tangkap mencapai 5,71 juta ton dan meningkat menjadi sekitar 5,83 juta ton tahun berikutnya. Di tahun 2013 perikanan tangkap laut mencapai peningkatan sekitar 6,12 juta ton. Bahkan untuk tahun-tahun berikutnya produksi perikanan tangkap terus mengalami peningkatan secara signifikan hingga tahun 2016 sebesar 6,83 juta ton

Tidak hanya dalam sektor perikanan tangkap saja, untuk produksi perikanan budidaya juga mengalami peningkatan enam tahun terakhir. Pada tahun 2011 produksi perikanan budidaya mencapai 7,93 juta ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 9,68 juta ton. Ini, menunjukkan bahwa perikanan di Indonesia bisa menjadi sektor unggulan dalam perekonomian nasional.

Sektor perikanan yang strategis tersebut diharapkan dapat menjadi indikator dalam pembangunan perekonomian terutama untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pesisir dapat dicapai melalui kerjasama dan dukungan, baik dukungan dari pemerintah maupun partisipasi masyarakat nelayan yang berada di wilayah tersebut. Pembangunan di Indonesia diartikan sebagai upaya-upaya yang direncanakan dan diorganisasikan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Indonesia harus mempunyai dampak atas pembangunan di daerah, sebab daerah adalah bagian integral dari suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, rencana pembangunannya meliputi rencana pembangunan nasional maupun rencana pembangunan dalam tataran regional. Pembangunan ekonomi nasional mempunyai dampak atas struktur ekonomi nasional dan struktur ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Arsyad,1999). Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien. Upaya pembangunan tersebut harus dilakukan pada semua sektor salah satunya seperti sektor perikanan.

Karakter geografis dan kandungan sumberdaya perikanan yang dimiliki Indonesia memberikan pengakuan (*justifikasi*) bahwa Indonesia merupakan Negara bahari dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan sektor yang memiliki peluang amat potensial untuk dimanfaatkan dan dikelola guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor perikanan menjadi tumpuan bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha perikanan baik penangkapan maupun budidaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2014, rumah tangga di Indonesia yang mengandalkan hidupnya dari menangkap ikan di perairan umum dan laut sebanyak 964.231 atau sekitar 1,5 persen dari rumah tangga di Indonesia. Dari jumlah itu, rumah tangga nelayan laut yang tergolong miskin ada 23,79 persen, nelayan di perairan umum 24,98 persen, sedangkan budidaya 23,44 persen. Rumah tangga usaha penangkapan ikan di laut memiliki pendapatan per kapita lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga usaha penangkapan ikan di perairan umum dan rumah tangga usaha budidaya ikan. Berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita nelayan di perairan umum adalah Rp 642.350, sedangkan nelayan laut Rp 737.030. Pendapatan rumah tangga nelayan di perairan umum adalah Rp 2.338.600 dan nelayan laut Rp 3.030.200. Asian Development Bank menyatakan penduduk miskin hidup dengan penghasilan di bawah US\$2. Dengan kurs sekitar Rp13.000 per dolar, penghasilan sebulan penduduk miskin di bawah Rp780.000. ADB mencatat ada 11,3 persen penduduk Indonesia berada di bawah kemiskinan. Sebagai catatan, berdasarkan data BPS maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terkenal dengan hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, tembakau dan kopi. Tingginya produksi perkebunan menjadikan citra Sumut lebih condong ke sektor perkebunan. Padahal, dengan wilayah perairan yang cukup luas, sektor perikanan juga sangat menjanjikan dan memiliki prospek cerah. Terlebih lagi wilayah perairan Sumut yang berada di Selat Malaka dan Samudera Hindia kaya ikan. Hasil ikan tangkapan laut tidak hanya menyuplai kebutuhan protein masyarakat Sumut, tetapi juga menjadi sumber mata pencarian banyak nelayan dan sumber meningkatkan kesejahteraan mereka. Sektor perikanan sangat besar potensinya tidak hanya di Sumut, tetapi juga Indonesia, mengingat wilayah perairan lebih luas dibandingkan daratan. Apalagi potensi budidaya laut Indonesia masih 117 ribu hektare yang dimanfaatkan dari total 12 juta hectare, seharusnya dengan keadaan geografis Indonesia yang sangat mendukung untuk sektor perikanan mestinya harus dikelola dengan maksimal. Kini jumlah nelayan Sumut mencapai 250 ribu orang di sepanjang pantai pesisir timur (Selat Malaka) dan pantai barat (Samudera Hindia), sementara total nelayan di Indonesia mencapai 2,2 juta orang dengan kapasitas produksi 13 juta ton ikan per tahun. Khusus Provinsi Sumut, hasil tangkapan laut juga beragam dan melimpah meliputi ikan laut seperti gembung, cumi-cumi, udang, tongkol, dan lainnya yang mencapai 276 ribu ton di kawasan Selat Malaka dan 565 ribu ton di kawasan Samudera Hindia. Itu belum ditambah sektor perikanan budidaya di darat seperti ikan lele, gurami, vaname, udang dan mas.

Tabel 1.1 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi dan subsector (ton) 2011-2016

no	Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	143,681	148,765	153,692	157,944	173,034	189,261
2	Sumatera Utara	463,201	510,552	508,359	484,313	494,724	475,638
3	Sumatera Barat	196,511	197,460	211,004	214,734	204,771	200,610
4	Riau	90,503	95,609	93,279	107,305	105,298	102,101
5	Jambi	44,700	46,894	47,713	48,031	43,204	47,134
6	Sumatera Selatan	43,800	44,092	44,764	48,186	61,392	69,583
7	Bengkulu	39,860	44,561	50,918	60,705	62,291	62,426
8	Lampung	154,484	144,485	163,107	157,968	163,384	164,420
9	Kepulauan Bangka Belitung	192,474	202,565	199,243	203,285	139,633	189,967
10	Kepulauan Riau	157,506	147,310	140,597	139,331	149,745	151,215
11	DKI Jakarta	180,198	219,836	209,733	226,060	289,214	143,640
12	Jawa Barat	185,825	198,978	207,462	206,156	271,332	218,194
13	Jawa Tengah	251,536	256,093	224,229	242,072	336,047	334,298
14	DI Yogyakarta	3,954	4,094	3,396	5,387	3,918	3,254
15	Jawa Timur	362,624	367,922	378,329	385,878	402,569	390,271
16	Banten	57,891	59,702	58,568	59,302	68,006	52,445
17	Bali	100,503	80,413	102,251	116,910	104,970	102,336
18	Nusa Tenggara Barat	140,170	132,781	142,190	227,084	208,334	170,166
19	Nusa Tenggara Timur	102,137	66,005	103,825	111,415	118,391	128,931
20	Kalimantan Barat	94,063	101,991	120,079	165,622	136,301	113,430
21	Kalimantan Tengah	46,400	54,574	66,312	66,384	100,427	123,804
22	Kalimantan Selatan	115,688	131,074	176,691	178,916	170,861	176,506
23	Kalimantan Timur	102,907	105,393	107,147	111,199	99,940	101,718
24	Kalimantan Utara					15,801	16,284
25	Sulawesi Utara	230,523	279,031	282,980	295,204	257,774	302,864
26	Sulawesi Tengah	145,784	196,108	259,984	263,887	171,565	210,141
27	Sulawesi Selatan	218,819	247,173	277,896	287,897	318,394	295,143
28	Sulawesi Tenggara	227,356	135,446	124,549	150,588	146,325	185,429
29	Gorontalo	75,680	84,683	91,439	102,534	104,437	117,314
30	Sulawesi Barat	72,454	42,002	45,810	46,717	55,759	64,336
31	Maluku	567,953	537,262	551,812	538,121	617,985	583,639
32	Maluku Utara	150,232	150,970	151,541	218,097	251,110	254,856
33	Papua Barat	117,053	120,329	121,774	119,984	136,393	151,587
34	Papua	269,259	281,480	286,339	290,438	221,340	222,528
35	Indonesia	5,345,729	5,435,633	5,707,012	6,037,654	6,204,668	6,115,469

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2016 (www.bps.go.id)

Dari table diatas bisa dilihat Sumatera Utara berada di posisi 2 dari semua provinsi yang ada di Indonesia Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut provinsi dan subsector (ton) yang berjumlah 475,638 ton dan posisi pertama yaitu Maluku yang berjumlah 583,639 ton di tahun 2016. Itu belum ditambah sektor perikanan budidaya di darat seperti ikan lele, gurami, vaname, udang dan mas.

Pengertian minapolitan terdiri dari dua kata mina artinya ikan dan politan artinya kota, jadi minapolitan adalah kota perikanan. Kawasan minapolitan berdasarkan turunan kawasan Agropolitan : adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Tujuan dan sasaran pengembangan kawasan minapolitan secara lengkap disebutkan pada Kepala Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/Men/2011 tentang pedoman umum minapolitan. Namun secara esensial, sasaran program minapolitan bisa disarikan menjadi 4 (empat) hal utama sebagai berikut:

1. Pelayanan secara terpadu dan efisien dari instansi pusat dan daerah serta instansi lintas-sektor pada kawasan minapolitan;
2. Berkembangnya sektor ekonomi dari komoditas sektor perikanan

3. Kawasan sentra minapolitan bersama wilayah sekitarnya tumbuh sebagai kota mandiri
4. Pengisian tenaga kerja pada wilayah sekitar sentra minapolitan sesuai dengan kapasitas daya dukung produksi perikanan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/MEN/2010, telah ditetapkan sebanyak 197 lokasi minapolitan, yang terdiri atas 159 lokasi berfokus pada perikanan budi daya, dan 38 lokasi yang berbasis pada perikanan tangkap. Namun, pada tahun 2011, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP memprioritaskan pada sembilan lokasi sebagai kawasan percontohan yaitu:

- 1) PPN Palabuhanratu Sukabumi (Jawa Barat)
- 2) PPS Cilacap (Jawa Tengah)
- 3) PPN Tamperan Pacitan (Jawa Timur)
- 4) PPN Muncar Banyuwangi (Jawa Timur)
- 5) PPN Ternate (Maluku Utara)
- 6) PPN Sungai Liat Bangka (Bangka Belitung)
- 7) PPS Bitung (Sulawesi Utara)
- 8) PPS Belawan Medan (Sumatera Utara)
- 9) PPN Ambon (Maluku)

PPN : pelabuhan perikanan nusantara

PPS : pelabuhan perikanan samudera

Penetapan 9 lokasi minapolitan berbasis perikanan tangkap tersebut cukup realistis sebagai daerah percontohan pada tahap inisiasi program. Di samping itu, daerah-daerah tersebut merupakan pusat produksi perikanan tangkap dan mewakili karakteristik perikanan tangkap di Indonesia.

Berdasarkan pada lampiran keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 35 /kepmen-kp/2013 tentang penetapan kawasan minapolitan bahwa kota medan termasuk kawasan minapolitan yaitu terletak pada PPS belawan. Sebaran ini dapat dilihat di table 1.2 di bawah ini berikut adalah nama tempat yang termasuk dalam kawasan minapolitan di Provinsi Sumatera Utara :

Table 1.2 Penetapan Kawasan Minapolitan Di Sumatera Utara

NO	KABUPATEN	KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA	KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
1	Serdang Berdagai	a.Kecamatan Perbaung b.Kecamatan Tebing Tinggi c. Kecamatan Tebing Syahbandar d. Kecamatan Dolok Masihul e. Kecamatan Serbajadi	PPI Sialang
2	Tapanuli Utara	a. Kecamatan Tarutung b. Kecamatan PahaeJae c. Kecamatan Siborongborong d. Kecamatan Muara	
4	Tapanuli Tengah		PPN Sibolga
5	Kota Medan		PPS Belawan
6	Simalungun		PUD Danau Toba

Sumber : kementerian kelautan dan perikanan Indonesia.

Bisa dilihat dari table diatas kota medan di tetapkan sebagai kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap yaitu berada di PPS Belawan. Kalau dilihat dari semua

kabupaten dan kota di Sumatera Utara kota medan memperoleh produksi perikanan tangkap sebesar 58,933 ton, kalau di bandingkan dengan kabupaten dan kota yang berada di Sumatera Utara kota medan berada di peringkat 3 dalam perolehan perikanan tangkap karena adanya PPS Belawan yang merupakan pusat produksi perikanan tangkap.

Tabel 1.3 Produksi Ikan menurut Asal Tangkapan dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (ton), 2017.

no	Kabupaten/kota	laut	Perairan umum	jumlah
1	N i a s	12	0	12
2	Mandailing Natal	8 495	0	8 495
3	Tapanuli Selatan	0	161	161
4	Tapanuli Tengah	297 434	2 065	299 499
5	Tapanuli Utara	0	34	34
6	Toba Samosir	0	1 001	1 001
7	Labuhanbatu	17 361	14	17 375
8	A s a h a n	63 716	7 176	70 892
9	Simalungun	0	693	693
10	D a i r i	0	99	997
11	K a r o	0	11	11
12	Deli Serdang	39 127	207	39 334
13	Langkat	8 593	14	8 607
14	Nias Selatan	62	0	62
15	Humbang Hasundutan	0	536	536
16	Pakpak Bharat	0	0	0
17	Samosir	0	4 444	4 444
18	Serdang Bedagai	28 518	151	28 669
19	Batu Bara	18 036	2 732	20 768
20	Padang Lawas Utara	0	207	207
21	Padang Lawas	0	219	219
22	Labuhanbatu Selatan	0	122	122
23	Labuhanbatu Utara	903	0	903
24	Nias Utara	1 606	0	1 606
25	Nias Barat	12	0	12
26	S i b o l g a	51 977	0	51 977
27	Tanjungbalai	168 154	0	168 154
28	Pematangsiantar	0	4	4
29	Tebing Tinggi	0	2	2.2
30	M e d a n	58 933	56	58 989
31	Binjai	0	3 289	3 289
32	Padangsidempuan	0	19	19
33	Gunungsitoli	1 125	0	1 125

sumber : badan pusat statistik sumatera utara tahun2017 (www.bps.go.id)

Menurut asal tangkapan yaitu laut dan perairan umum, laut penangkapan yang diambil langsung dari laut dan perairan umum yaitu berasal dari sungai atau danau.

Konsep pengelolaan minapolitan perikanan tangkap didasarkan pada konsep membangun sistem pengelolaan perikanan tangkap yang berbasis pada kemudahan nelayan bekerja dan memotivasi mereka untuk meningkatkan pendapatan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Di samping itu, juga memberikan kemudahan nelayan dalam bekerja dengan penyediaan sarana dan prasarana (pelabuhan perikanan, galangan kapal, bengkel, SPDN/SPBN, unit pengolahan ikan, pabrik es dan unit pemasaran) di sentra-sentra nelayan, penyederhanaan perijinan dan penyediaan permodalan (KKP 2010).

Pelaksanaan konsep minapolitan harus disesuaikan dengan tujuannya, yaitu peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi daerah. Terkait dengan minapolitan perikanan tangkap (KKP 2011), paket-paket kegiatan perikanan tangkap sekurang-kurangnya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

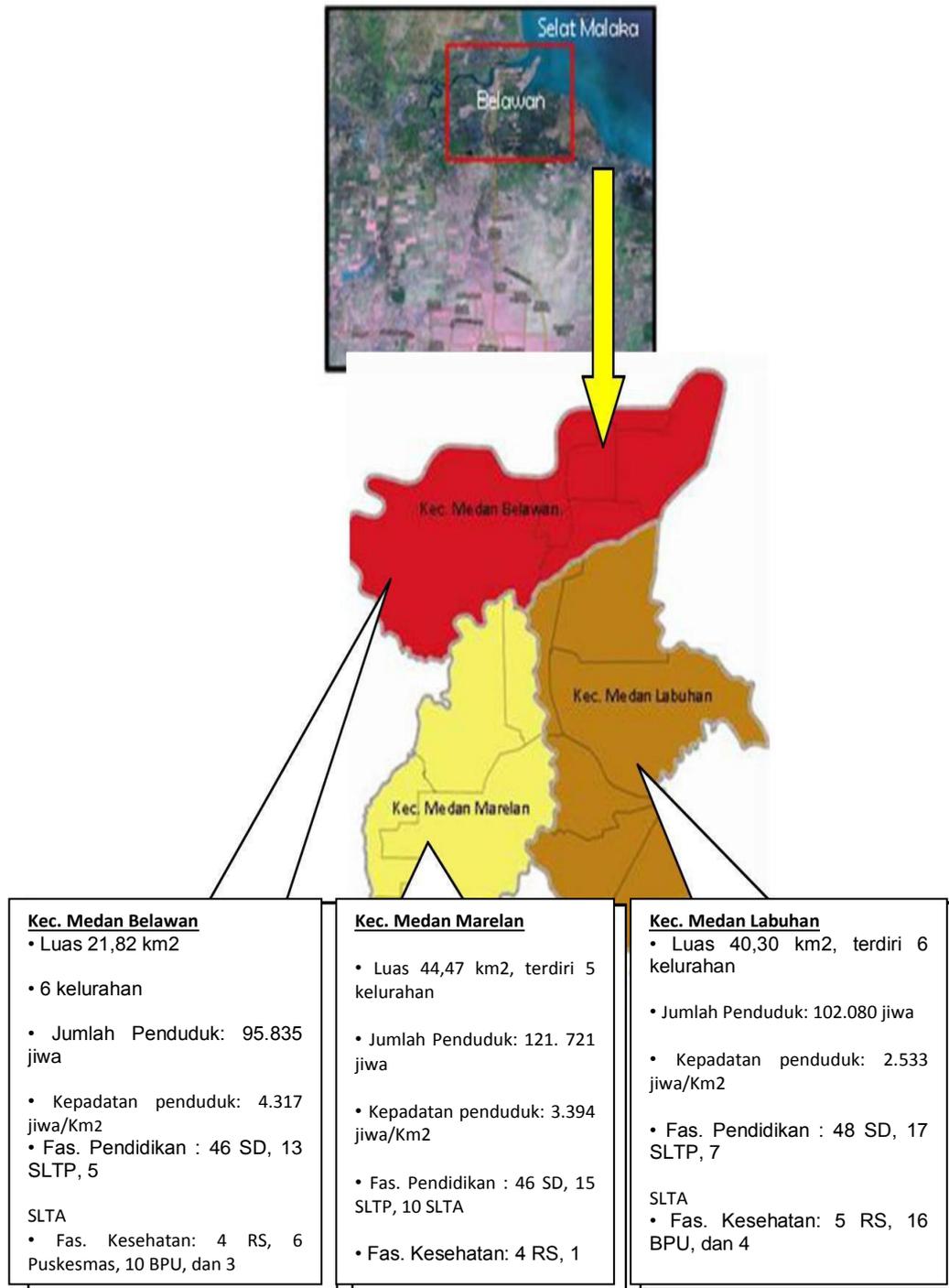
- 1) Komoditas unggulan dan target produksi;
- 2) Distribusi wilayah penangkapan pro nelayan;
- 3) Struktur armada nasional;
- 4) Sistem pengkayaan stok, moratorium, dan peningkatan produksi;
- 5) Sistem pelayanan perijinan;
- 6) Sistem pengelolaan pelabuhan perikanan dan TPI efisien pro nelayan;
- 7) Sistem insentif usaha dan investasi;
- 8) Teknologi penangkapan dan penanganan ikan di atas kapal;

- 9) Bantuan teknis, seperti sarana dan permodalan serta pendampingan; dan
- 10) Pembangunan prasarana.

Berdasarkan data *Badan Pusat Statistik* (BPS), angka kemiskinan masih tinggi untuk Kota Medan khususnya di wilayah utara, yakni 30 persen, hal ini terjadi karena kondisi yang dominan dimana masyarakat pesisir yang bergantung pada mata pencaharian nelayan dan hal ini rentan kepada terciptanya ekonomi masyarakat miskin, dengan adanya perencanaan minapolitan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP pada tahun 2011 kiranya dapat membantu mengatasi kemiskinan yang terjadi di kawasan utara kota medan. Dalam kkp lampiran keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 35 /kepmen-kp/2013 tentang penetapan kawasan minapolitan memprioritaskan PPS Belawan merupakan pusat produksi perikanan tangkap di kota medan.

Walikota Medan pun mengatakan dengan ditetapkannya Kawasan Medan Utara kota Medan sebagai kawasan Minapolitan, akan berdampak terhadap percepatan pembangunan kawasan Utara kota Medan dan untuk kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan. Pembangunan pada kawasan Utara kota Medan yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan. Bisa dilihat dari gambar 1.2 dibawah ini.

Gambar 1.2 Kawasan Utara Kota Medan



Sumber : Wikipedia

Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan Perikanan, mengembangkan wiraswasta perikanan serta memasang dan atau mendorong usaha industri perikanan dan pemasaran hasil perikanan, memperkenalkan dan mengembangkan teknologi hasil perikanan. Saranan dan prasaran yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan terdiri dari :

1. Fasilitas pokok yang ada di pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yaitu Dermaga dengan panjang 154 m lebar 8 m, Alur pelayaran dengan panjang 1500 m, Jalan pelabuhan dengan panjang 2.512 m, Jetty yang berjumlah 3 unit dengan panjang 48 m lebar 7 m, Turap/Revetment dengan panjang 265 m dan Drainase dengan panjang 1.489 m.
2. Fasilitas Fungsional yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Balawan yaitu kantor pelabuhan dengan luas 852 m², Transit Sheed (TPI) dengan luas 670 m², cold storage berjumlah 11 unit dengan kapasitas 2100 ton, Kantor Kesyahbandaran dengan luas 200 m², Navigasi (Rambu Suar) yang berjumlah 3 unit, Bus pegawai berjumlah 1 unit, APMS (Agen Penyalur Minyak Solar) 6unit, SPDN (Sistem Penyaluran Dalam Negeri) 1 unit, Pabrik Es berjumlah 4 unit dengan kapasitas 622 ton/hari, Pasar Ikan Higienis dengan luas 200 m² dan Gedung Pengawasan Mutu dan Pelayanan SHTI.
3. Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yaitu Kios Waserda berjumlah 28 unit, Masjid PPS Belawan dengan liuas 120 m²,

Guest House dengan luas 150 m², Balai Pertemuan Nelayan dengan luas 150 m², Pos Terpadu dengan luas 70 m², dan Mes operator dengan luas 120 m².

Daerah operasi kapal ikan yang di layani adalah laut teritorial dan ZEE perairan Internasional. Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Gabion sebagai lahan bangunan yang di bangun oleh pihak swasta atau yang di dirikan oleh pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha yang berada di gabion seperti Tangkahan yang berjumlah 23 unit, bengkel 8 unit, cold storage 11 unit, Pabrik Es 4 unit dan penyediaan BBM 9 unit, tempat pengolahan ikan, kios waserda 28 unit untuk penyediaan perbekalan nelayan melaut. Sedangkan pihak Perum Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan mengelola TPI 1 unit, Pabrik Es 1 unit, dan kantor-kantor seperti PPS Belawan, Perum Pelabuhan Perikanan Samudera Cabang Belawan, Stasiun PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan), Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi SUMUT dan Pemko Medan dan Polres Pelabuhan Belawan. Balai Pertemuan Nelayan selama ini di manfaatkan untuk berbagai pertemuan dan rapat-rapat dinas, baik yang bersifat intern maupun koordinatif dengan instansi berkait, gues house, pos terpadu, mes operator.

Dengan adanya Pelaksanaan konsep minapolitan yang Terkait dengan minapolitan perikanan tangkap yang telah di tetapkan oleh kementrian kelautan dan perikanan pada tahun 2011 tentu pastinya konsep dan paket kegiatan-kegiatan tersebut sudah terlaksana, namun tidak di pungkiri masih banyak masyarakat miskin di kawasan Utara Kota Medan hingga saat ini.

Table 1.4 penduduk miskin di kota medan

Kabupaten / kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Medan	212.30	204.19	201.06	209.69	200.32	207.50	206.87	204.22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan (www.medankota.bps.go.id)

Jumlah warga miskin di Kota Medan cukup tinggi. Dari 2,6 juta penduduk di Kota Medan, 18% atau sekitar 463.000 jiwa di antaranya hidup berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan di Medan yang berjumlah 18% itu jauh berada di atas angka kemiskinan tingkat nasional yang hanya 9,66 %. "Penduduk Medan 2,6 juta jiwa, yang berada di garis kemiskinan itu kurang lebih 463.000 jiwa atau sekitar 129.613 kepala keluarga (KK). Mayoritas mereka berada di daerah Medan bagian utara," kata Kepala Dinsos Medan, di Medan, Jumat (15/2/2019).

Walaupun sudah adanya konsep minapolitan dan paket kegiatan kegiatan minapolitan tangkap yang telah di tentukan oleh kementerian kelautan perikanan KKP pada tahun 2011, namun masih saja kawasan utara kota medan masih jadi lapak kemiskinan hingga saat ini

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisa Evaluasi Kebijakan Minapolitan Tangkap di Wilayah Utara Kota Medan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan dalam latar belakang ialah, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Tidak terealisasikannya konsep minapolitan perikanan tangkap terhadap masyarakat di kawasan Utara kota Medan terutama para nelayan.
2. Tidak adanya manfaat yang dirasakan oleh para masyarakat Utara kota medan yang berprofesi sebagai nelayan kecil dari konsep minapolitan perikanan tangkap.

1.3 Batasan masalah

Ada banyak masalah yang bisa diangkat dari penelitian ini, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah. Jadi penelitian ini dibatasi pada masalah Evaluasi Kebijakan Minapolitan Tangkap di Wilayah Utara Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perkembangan produksi perikanan tangkap PPS Belawan dan perkembangan masyarakat miskin yang berprofesi sebagai nelayan di kawasan Utara kota Medan ?
2. Seberapa besar kemajuan indikator sosial dan ekonomi dari kebijakan konsep minapolitan untuk perikanan tangkap di kawasan Utara kota Medan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif perkembangan produksi perikanan tangkap PPS Belawan dan perkembangan masyarakat miskin yang berprofesi sebagai nelayan di kota medan.
2. Melakukan evaluasi dalam mengukur efisiensi dan efektifitas bagi sasaran kawasan minapolitan pada perikanan tangkap.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya :

1.6.1 Manfaat Akademik

a. Bagi peneliti:

- (1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.
- (2) Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

b. Bagi mahasiswa:

- (1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
- (2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

1.6.2 Manfaat Non-akademik

- a. Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintahan.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada saat ini merupakan salah satu syarat mutlak apabila suatu wilayah ingin mengalami pertumbuhan ekonomi. Suatu wilayah dikatakan sejahtera apabila dilihat dari pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan wilayah yang lain, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti dengan terjadinya pemerataan.

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (*income* per-kapita) dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier dikutip dalam Kuncoro, 2006:5).

Pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan. Berdasarkan Jhingan (2012:338), salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal

materil maupun modal manusia, ada berbagai pendapat bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi, dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta.

Tujuan pokok pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dibidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri (Jhingan, 2012:338), selain itu modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya. Untuk dapat meningkatkan kemajuan perekonomian, suatu negara harus memenuhi persyaratan dasar dalam melakukan pembangunan. Berdasar M.L Jhingan (2012:41), prasyarat-prasyarat dasar bagi pembangunan ekonomi diantaranya:

1. Atas dasar kekuatan sendiri, hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari warga negara itu sendiri
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar yang menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan, sehingga diperlukan perbaikan dan penggantian lembaga sosio ekonomi.
3. Perubahan struktural, adanya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri moderen, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal.

4. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis didalam proses pembangunan, namun penyediaan atau penciptaan modal akan menjadi sia-sia kalau tidak ada faktor lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi.
5. Kriteria investasi yang tepat, merupakan tanggungjawab negara untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat, harus dikaji dengan mempertimbangkan keseluruhan kompleks dinamika perekonomian.
6. Persyaratan sosio budaya, wawasan sosio budaya masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan diharapkan dapat berjalan. Kenaikan pendapatan nasional tidak akan membawa kenaikan kesejahteraan sosial, jika kenaikan pendapatan itu kurang dibarengi dengan penyesuaian budaya.
7. Administrasi, kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa dan tidak korup, merupakan sine qua non pembangunan ekonomi. Tanpa alat perlengkapan administratif yang baik dan efisien, rencana pembangunan publik maupun privat tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna Antara pendapatan pada masyarakatnya sehingga pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menjadi sangat penting bagi terciptanya kemakmuran suatu wilayah. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan bekerjasamanya pihak swasta dan pemerintah dalam bentuk investasi. Investasi pada suatu wilayah juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pada wilayah tersebut sehingga nantinya investasi akan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan bukan sebaliknya.

2.1.1.1 Teori Klasik

1. Adam smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi.

2. David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*. Buku ini diterbitkan 1817. Edisi ketiga 1921 serta korespondensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lainnya yang menurut ide-ide Ricardo yang menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satu pun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi. Oleh sebab itu analisa Ricardo merupakan analisa yang memutar.

Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan. Sementara Ricardo sendiri menulis dalam pendahuluan bukunya, "Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisasi, dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan." Keseluruhan pendapatan nasional dibagi-bagikan tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan dan upah (Jhingan, 2010)

3. Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu:

a. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula, hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan *input* variabel tenaga kerja yang terlalu besar, dalam perekonomian semacam ini pangsa semua pekerjaan terhadap *output* yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

b. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari *input* yang digunakan, termasuk tenaga kerja, hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif, dengan demikian perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai.

4. Hollis B. Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi *capital* dan peningkatan sumberdaya manusia (*human capital*). (Todaro & Smith, 2011)

5. Rei-Ranis

Teori pembangunan ekonomi Rei-Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin

sumberdaya, dimana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonomi pertaniannya berhenti orang bergerak di lapangan pertanian tradisional. Bidang-bidang nonpertanian memang ada, tetapi begitu banyak mempergunakan modal, disitu juga ada sektor industri yang aktif dan dinamis. Pembangunan terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian, yang sumbangannya terhadap *output* adalah nol atau dapat diabaikan, ke sektor industri di mana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah di bidang pertanian.

2.1.1.2 Teori Keynes

Ekonomi Keynesian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda,

masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi Great Depression, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu,

agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah.

Teori Keynes mengemukakan kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segment masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya; yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dari teori Keynes ini adalah “Peranan Pemerintah” yang tadinya diharamkan dalam Teori Ekonomi Klasik. John Meynard Keynes menjelaskan teori ekonominya dalam buku karangannya berjudul “*The General Theory Of Employment, Interest And Money*”. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrold Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosio-ekonomi. Ia hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. Sebagaimana tulis Schumpeter, “ajaran praktis Keynes merupakan bibit yang tidak dapat dipindahkan ke tanah seberang, ia akan mati di sana dan **bahkan** menjadi beracun sebelum mati. Tetapi ditanah Inggris, tanaman ini tumbuh dengan subur dan menjanjikan buah dan keteduhan. Begitu juga dengan saran lain yang pernah dikemukakan Keynes.

2.1.2 Teori Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi regional (IER) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Ilmu bumi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari keberadaan suatu kegiatan di suatu lokasi dan bagaimana wilayah sekitarnya bereaksi atas kegiatan tersebut. Ilmu bumi ekonomi menggarap kegiatan itu secara individual, yaitu mempelajari dampak satu atau kelompok kegiatan dari satu lokasi terhadap kegiatan lain di lokasi lain, atau bagaimana kinerja kegiatan di lokasi itu sebagai akibat dekat atau jauhnya lokasi itu dari lokasi kegiatan lain, tetapi lokasi tersebut saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu ekonomi regional tidak membahas kegiatan individual melainkan menganalisis suatu wilayah (atau bagian wilayah) secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah. Ilmu ekonomi regional termasuk salah satu cabang yang baru dari ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi lain yang terakhir berkembang adalah ilmu ekonomi lingkungan sebagai pecahan dari ilmu ekonomi regional. Pemikiran ke arah ekonomi regional secara sepotong-sepotong dicetuskan oleh Von Thunen (1826), Weber (1929), Ohlin (1939) dan Losch (1939). Namun secara umum Walter Isard adalah orang pertama yang dianggap dapat member wujud atas ilmu ekonomi regional, IER baru menunjukkan wujudnya setelah diterbitkannya disertasi Walter Isard di Universitas Harvard yang berjudul *Location and Space Economics* (1956).

Walter Isard adalah orang yang pertama memberikan kerangka landasan tentang apa saja yang dapat dikategorikan ke dalam regional science, yang pada dasarnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi antara wilayah yang memiliki potensi yang berbeda. Sejarah Perkembangan Regional Science Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, di masa lalu ada teori-teori yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari ekonomi regional yang tertuang secara berserakan pada berbagai tulisan. Dalam hal ini, antara lain model lokasi berbagai jenis usahadani Von Thunen (1826) model lokasi dari Weber (1929), teori Central Places dari Christaller (1933), dan teori lokasi ekonomi dari Losch (1939). Di antara keempat teori tersebut, di dalam studi ekonomi, hanya teori Weber yang agak banyak dikenal. Regional Science mencakup beberapa bidang ilmu, seperti ekonomi regional, ilmu bumi ekonomi, sosiologi, antropologi, ilmu hukum. Dalam pertumbuhannya, terutama karena didesak oleh kebutuhan, materi dari regional science banyak dibahas dalam perencanaan perkotaan dan perencanaan pembangunan daerah. Di dalam perencanaan daerah selalu muncul permasalahan tentang memilih lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan akan dibangun di masa mendatang. Karena tidak adanya pedoman atau buku referensi yang dapat dipakai, penentuan lokasi sering dilakukan atas dasar musyawarah dari orang-orang yang memiliki berbagai keahlian/kepentingan dalam suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah (pedesaan dan perkotaan).

2.1.2.1 Teori Lokasi Weber

Teori lokasi menurut (Tarigan, 2005) adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi

geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun social. Adapun faktor-faktor yang menentukan lokasi industri menurut Djojodipuro (1992) sebagai berikut : a) .Pasar dan harga. b) .Bahan baku dan energi. c) Aglomerasi, keterkaitan antar industri dan penghematan ekstern. d) Kebijakan pemerintah dan f) Biaya angkutan.

Menurut Hamzah (1997), dalam tesisnya menyatakan, "fungsi utama dari teori lokasi adalah untuk menjelaskan bagaimana berbagai aktivitas ekonomi saling berkaitan didalam ruang geografi". Tapi teori pada umumnya menyatakan bahwa teori lokasi lebih menekankan pada lokasi dari industri, dimana semakin dekat lokasi industri, maka akan semakin kecil harga satuan angkutan untuk industri tersebut. Teori lokasi Industri dikemukakan oleh Alfred Weber, dalam bukunya yang berjudul *Uber den Standort der Industrien* (1909) yang kemudian dialih bahasakan oleh J.C. Friedrich menjadi *Alfred Weber's Theory of Location of Industries* (1929). Menurut teori Weber pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Weber menyatakan 'bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Isi pokok Teori Weber adalah memilih lokasi industry yang biayanya paling minimal (principleast cost location) dan untuk mendapatkan enam pra-kondisi tersebut perlu diasumsikan : 1) Wilayah yang seragam dalam hal topografi, iklim dan penduduk (berkaitan denganketerampilan) 2) Sumber daya atau bahan mentah yang terdapat ditempat tertentu saja. 3) Upah buruh yang telah baku, artinya sama

dimana juga. 4) Biaya transportasi yang tergantung dari bobot bahan mentah yang diangkut dan dipindahkan. Terdapat kompetisi antar industry. Manusia berfikir rasional Menurut Weber yang dikutip oleh Syafrizal (2008), teori lokasi berorientasi kepada tempat lokasi mengalami perkembangan pesat sehingga dijabarkan sebagai berikut :

1. Lokasi Perusahaan satu Bahan Baku dan Satu Pasar
2. Lokasi Industri Dua Bahan Baku dan Satu Pasar.

2.1.2.2 Industri

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, yang dimaksud industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2008 industri mempunyai dua pengertian. Pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi bersifat produktif. Dalam pengertian secara sempit, industri hanyalah mencakup industri pengolahan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi, kemudian barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya dan sifatnya lebih kepada pemakaian akhir.

2.1.2.3 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

untuk masyarakat. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut (Mulyadi, 2003). Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan atau kegiatan di sektor industri kecil. Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun (Mantra, 2003). Tenaga kerja merupakan sejumlah orang yang mempunyai keterampilan dan kemampuan tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dari segi keahlian dan pendidikannya tenaga kerja dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut : a).Tenaga kerja kasar yaitu tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. b).Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan tukang memperbaiki televisi dan radio. c).Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu seperti dokter, akuntan ahli ekonomi, dan insinyur (Rochman, 2005).

Faisal Karsyono dalam Rochman (2005) mengungkapkan bahwa sebagian besar tenaga kerja industri rumah tangga di pedesaan yang terserap dalam lapangan kerja non pertanian merupakan tenaga kerja tidak terampil, pendidikan rendah, dan biasanya berasal dari anggota keluarga sendiri. Oleh karena itu dalam perkembangan lapangan kerja non pertanian di pedesaan diprioritaskan pada jenis industri yang berteknologi sederhana, modal usaha kecil, dan bersifat padat karya sehingga jenis industri tersebut mudah untuk dikembangkan dan diusahakan oleh masyarakat pedesaan. Jumlah tenaga kerja apabila diikuti dengan tingkat

pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai akan memberikan kekuatan pada industri rumah tangga.

2.1.2.4 Pemasaran

Pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia (Kotler,2001). Pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memerlukan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial (Stanton, 1996). Hardati dalam Rochman (2005) memberikan penjelasan bahwa pemasaran industri merupakan strategi memasarkan produk yang digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Pemasaran industri mengarahkan produknya untuk perusahaan- perusahaan yang menjual produknya kembali kepada orang lain, kepada lembaga-lembaga yang membutuhkannya untuk membantu aktifitas mereka setiap hari. Pemasaran industri mengarahkan produk untuk konsumen akhir atau pemakai. Secara garis besar jalur-jalur pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sebagai berikut: 1. Pemasaran secara langsung, yaitu. a. Produsen menjual langsung dengan cara mengunjungi konsumen dari rumah ke rumah. b. Produsen menjual produknya secara langsung kepada konsumen di pasar. 2. Pemasaran secara tidak langsung, yaitu. a. Produsen menjual produk melalui tengkulak dipasar.

Menurut Hardati dalam Rochman (2005), yang dimaksud dengan pemasaran adalah cara pemasaran hasil industri, sedangkan untuk mencari cara pemasaran hasil industri yaitu apakah dengan menjual langsung dengan jalan

mengunjungi konsumen ke rumah atau menjual secara langsung kepada pembeli dipasar atau dengan menjual secara tidak langsung yaitu menjual hasil produk industri melalui tengkulak ke pasar atau melalui juru lelang khusus.

2.1.3 Teori Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Selain itu partisipasi masyarakat diikut sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye dalam Dunn memiliki 3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (public policy), pelaku kebijakan (policy stakeholders), dan lingkungan kebijakan (policy environment). Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan tidak semata hanya melihat pada ketiga elemen itu saja. Namun juga dipengaruhi terhadap tahap-tahap pembuatannya. Menurut Dunn tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi 5 tahap yaitu : Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi/Legitimasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Penilaian/Evaluasi Kebijakan.

2.1.3.1 Penyusunan Agenda / Agenda Setting

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, perlu adanya penyusunan agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah atau isu-isu mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi.

Menurut William Dunn (1990), Isu/permasalahan kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua permasalahan bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Dalam hal ini perlu adanya tindakan perumusan masalah yang menurut Dunn dalam Leo Agustino bertujuan untuk :membantu para analisi kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah publik , memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Kesimpulan yang dimaksud diatas adalah masalah sebuah masalah yang dikaitkan dengan perumusan masalah dalam kebijakan publik bertujuan untuk menemukan sumber permasalahan utama kemudian menghasilkan sebuah kebijakan untuk penyelesaian masalah oleh para pembuat kebijakan.

Kriteria permasalahanya ang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya:

- a. Telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius
- b. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak,
- c. Mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas,

- d. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

2.1.3.2 Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan bisa disebut juga dengan perumusan kebijakan yang merupakan tahap awal pembuatan kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Namun, perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan atau perintah eksekutif maupun aturan administrasi yang diusulkan. Menetapkan suatu kebijakan diantara beberapa pilihan merupakan proses untuk memutuskan kebijakan publik yang terbaik dan dalam hal inilah sebenarnya inti dari proses formulasi kebijakan publik. Dalam formulasi kebijakan perlu diperhatikannya aspek-aspek yang melingkupi prosesnya seperti aspek publik, aspek teknokrtis, dan aspek politis.

2.1.3.3. Legitimasi Kebijakan

Adopsi/legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan di sah kan oleh pemerintah. Ini adalah

tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan kemudian secara pasti di ambil kepastian dan penetapan kebijakan.

2.1.3.4. Implementasi Kebijakan

Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Secara sederhana implementasi kebijakan merupakan tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan dilakukannya beberapa pendekatan salah satunya adalah top-down. Pendekatan tersebut bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur, administratur, atau birokrat di semua tingkatan yang terutama pada tingkatan bawah. Fokus analisis pada pendekatan ini adapada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari yang telah dirumuskan.

Model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Thomas R. Dye dikenal dengan istilah “Model Implementasi Interaktif” yang menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan ketika terdapat program yang dianggap kurang memenuhi harapan stakeholders. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap tahap implementasi dari kebijakan akan secara langsung dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan dari setiap tahap pelaksanaan dapat diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan yang di harapkan.

Model pendekatan tersebut memiliki kesamaan dan representasi elemen yang dimiliki oleh Grindle yaitu dikenal dengan “Implementation as a Political and Administrative Process”. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Dengan demikian tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai, Program dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2.1.3.5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Pelaksanaan evaluasi kebijakan pada dasarnya harus memperhatikan tiga hal yang menjadi pokok yaitu :

- 1) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan,
- 2) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepatutan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi,
- 3) Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi.

Pemahaman tentang evaluasi kebijakan menurut Riant Nugroho menjelaskan sebagai : “proses perbandingan antara standard dengan fakta dan

anallisis hasilnya”. Definisi tersebut sebelumnya pernah dikemukakan oleh Dye yang mentrakrifkan evaluasi kebijakan sebagai “is learning abaout the consequences of public policy”. Penjelasan yang didapat dari definisi evaluasi kebijakan tersebut adalah bahwa evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik yang berupa penilaian secara menyeluruh melalui pemeriksaan yangn objektif, sistematis dan empiris tentang efek dari kebijakan dan program terhadap target dari tujuan yang diinginkan.

2.1.4 Perencanaan

Pengertian ini menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang salig berhubungan dalam memilih salah satu di antara beberapa alternatif tentanng tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi/perusahaan. Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dilanjutkan pula dengan menetapkan anggaran untuk melaksanakan strategi dan metode tersebut, diiringi dengan memillih dan menetapkan kriteria tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilann organisasi/perusahaan dalam pencapaian tujuannya dengan mengimplementasikan strategi dan metode yang telah dipilih sebelumnya. Pengertian lain mengatakan bahwa “*Perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan siapa yang melakukannya.*” (Nawawi, H. 2003:30).

Definisi perencanaan menurut Sirojuzilamdan Mahalli (2010) adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud: (a) meningkatkan efesiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran

kelembagaan dan profesionalitas dan (c) merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Menurut Miraza (2005), perencanaan wilayah mencakup berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Perencanaan wilayah diharapkan akan dapat menciptakan sinergi bagi memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah.

Pengertian di atas, bahwa perencanaan dirumuskan untuk memecahkan masalah atau pelaksanaan pekerjaan di lingkungan suatu organisasi/perusahaan. Pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan merumuskan langkah-langkah kegiatan untuk menemukan alternatif terbaik dalam usaha mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Langkah-langkah tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan persiapan untuk menetapkan berbagai keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan melaksanakan keputusan-keputusan tersebut, diharapkan masalah-masalah organisasi/perusahaan dapat diselesaikan atau pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.5 Pembangunan Wilayah

Pengertian pembangunan wilayah menurut Glasson (1977), merupakan fenomena yang kompleks dan membutuhkan interaksi antar alam, sosial, ekonomi, dan faktor politik. Bagi daerah yang sumberdayanya kurang menguntungkan akan semakin bertambah ketimpangannya, sehingga dampak dari ketidakseimbangan struktural antar daerah menjadi tajam.

Pada terminologi ilmu ekonomi, pembangunan sering dibahas dalam pengertian pertumbuhan material yang dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat berhasil apabila angka pertumbuhannya dapat dikatakan cukup tinggi dan sekaligus membawa perubahan yang ada di masyarakat pada kondisi kehidupan yang lebih baik (soekartawi 1994 diacu dalam warningsih 2001).

Walaupun terdapat banyak konsep pembangunan wilayah seperti paparan di atas, namun pembangunan wilayah harus mempunyai tujuan yang konsisten terhadap pembangunan nasional yang meliputi lima bagian, yakni:

1. Mencapai pertumbuhan pendapatan per kapita yang cepat.
2. Menyediakan kesempatan kerja yang cukup.
3. Pemerataan pendapatan.
4. Mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan kemakmuran antar daerah.
5. Merubah struktur perekonomian agar tidak timpang.

Para ahli ekonomi berpendapat bahwasannya dalam menghadapi beberapa kendala yang berhubungan dengan pembangunan wilayah, pemerintah harus lebih banyak turut campur tangan dalam perencanaan dan pembangunan wilayah. Hal ini terjadi karena mekanisme pasar tidak dapat secara cepat menyebarkan hasil-hasil pembangunan dengan merata antar wilayah, sebab tingkat pembangunan di berbagai wilayah sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga keadaan yang seperti ini akan mengakibatkan ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, para ahli pembangunan wilayah

mengajukan pilihan konsep pemangunan wilayah sebagai salah satu cara yang ditempuh (Kadariah 1985).

Pembangunan perikanan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan pada peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam memecahkan berbagai permasalahan nasional di sektor pertanian, dalam upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani atau nelayan dan memajukan kehidupan desa pantai. Peningkatan efisiensi dan produktivitas perikanan melibatkan aspek Sumber Daya Manusia, penyerapan teknologi dan manajemen usaha yang memegang peranan penting bagi terciptanya efisiensi, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Direktorat Jendral Perikanan, pemangunan perikanan adalah proses upaya masyarakat untuk memanfaatkan SDM perikanan dan sumberdaya perairan melalui kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan produk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan devisa negara disertai upaya pemeliharaan dan pelestarian sumber daya hayati dan lingkungan secara lestari.

Kebijakan dan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki empat misi besar dari Departemen Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, kelautan, dan perikanan, khususnya nelayan dan petani kecil.
2. Peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

3. Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau pulau kecil, dan lautan.
4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan dalam suatu sistem bisnis berbasis perikanan yang terpadu yang disebut sistem Akua-bisnis, terdiri dari sub-sistem produksi, pengolahan pasca panen, dan pemasaran yang didukung oleh sub sistem sarana produksi yang mencakup sarana dan prasarana, finansial, Sumber Daya Manusia, dan IPTEK serta hukum dan kelembagaan (Dahuri 2001).

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian dan studi pustaka, diperoleh hasil, bahwasannya pengembangan kawasan minapolitan pernah dilakukan, penelitian tersebut bisa dilihat dibawah ini :

NO	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Suryawati, dan Purnomo (2011)	Keberlanjutan program minapolitan menggunakan dimensi ekologi, ekonomi sosial dan budaya, hukum dan kelembagaan, teknologi dan infrastruktur.	Budidaya perikanan layak untuk dikembangkan karena memiliki peluang dan kekuatan yang besar, sehingga dapat dimanfaatkan dengan menerapkan strategi kebijakan pertumbuhan agresif.
2	Nurlia (2011)	subsektor perikanan	Palingutama memberikan

		<p>memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong pertumbuhan PDRB di Kabupaten Pinrang.</p>	<p>kontribusinya terhadap sektor pertanian secara khususnya dan ke sektor ekonomi secara keseluruhan pada umumnya. Selain itu, subsektor perikanan juga menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan output yang dihasilkan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Kontribusi dari subsektor perikanan akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Pinrang, dimana ketika subsektor perikanan diikutsertakan dalam pendapatan perkapita maka akan menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan subsektor perikanan tidak diikutsertakan.</p>
3	Anna Kartika	Startegi alternatif dalam	tiga alternatif strategi yang

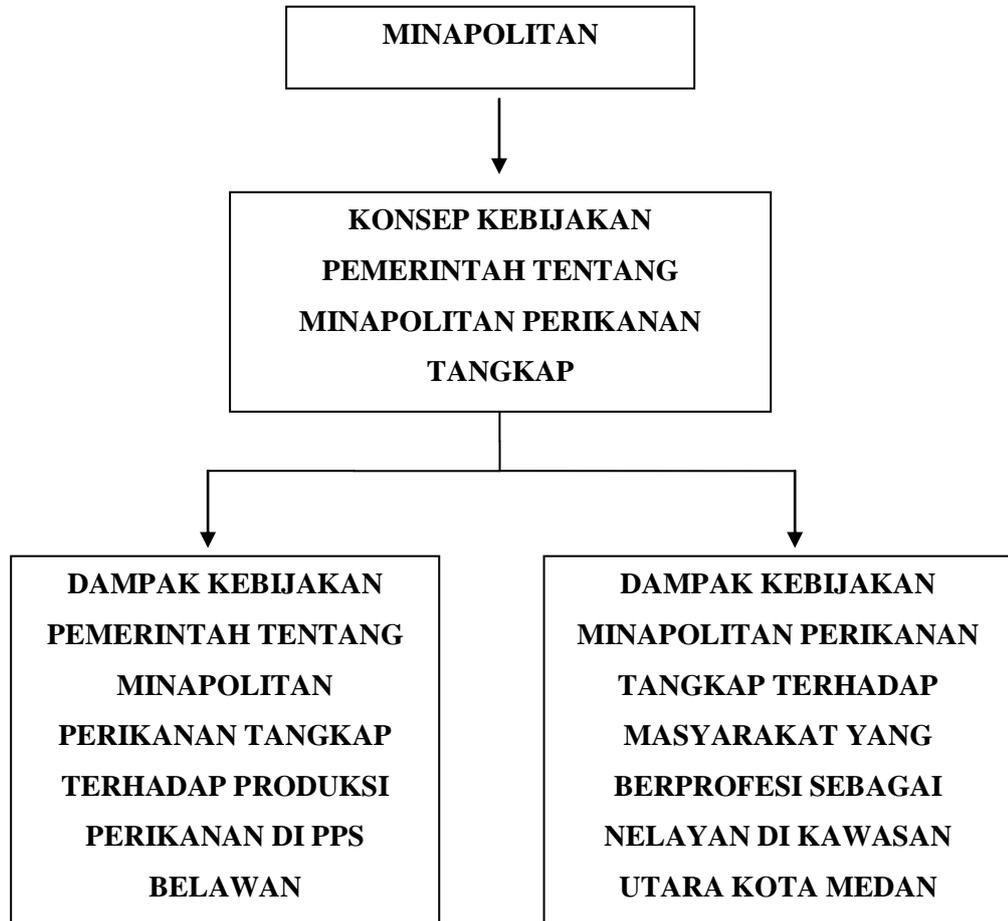
	(2004)	pengembangan kawasan sector perikanan	<p>dapat dirumuskan untuk pengembangan sektor perikanan, yang pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan secara terpadu dan efisien, yang kedua pengembangan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan produksi perikanan yang dapat memenuhi standar ekspor, karena untuk dapat mengekspor hasil produksi perikanan ada banyak kriteria yang harus dipenuhi. Yang ketiga, adanya peningkatan kerjasama antara pemerintah pengusaha perikanan dan masyarakat dalam rangka memonitoring pemanfaatan sumberdaya</p>
--	--------	---------------------------------------	---

			<p>perikanan secara berkelanjutan. selain tiga strategi utama, terdapat pula strategi lainnya yang dapat menunjang pengembangan, seperti pengembangan budidaya perikanan secara intensif untuk mendukung produksi dalam memenuhi kebutuhan lokal, antarpulau, dan regional, pengembangan manajemen perikanan yang disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, sehingga timbul peran aktif segenap lapisan.</p>
--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan

hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Adapun gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 :



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif, dimana hasil akhir dari penelitian ini dijabarkan dengan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan hasil akhir penelitian. Selanjutnya (Bogdan dan Taylor, 1984: 5) mengemukakan bahwa “metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang dan perilaku yang diamati”.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan di lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana dampak kebijakan minapolitan untuk perikanan tangkap terhadap nelayan kecil / tradisonal di Kecamatan Medan Belawan. *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

3.2 Definisi Operasional

Defenisi oprasional merupakan acuan dari landasan teori yang di gunakan untuk melakukan penelitian dimana variabel yang satu dengan yang lain dapat di hubungkan sehingga dapat di sesuaikan dengan data yang di inginkan.

Definisi operasional sebagai berikut :

	judul, dan pengesahan																			
2	Penulisan Profosal																			
3	Seminar Profosal																			
4	Analisis Data																			
5	Penulisan Laporan																			
6	Sidang Meja Hijau																			

3.4 Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek suatu penelitian yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2017:80). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir kecamatan Medan Belawan.

2. Sampel

Dalam penelitian ini sampelnya adalah masyarakat Kecamatan Medan Belawan yang berprofesi sebagai Nelayan, Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *non probability sampling*. *Non Probability Sampling* adalah penggunaan bagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi atau untuk menginformasikan tentang proses yang bermakna di luar kasus-kasus tertentu. Individu atau situs yang teliti. Jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini 50 Sampel. Karena menggunakan *Judgement Sampling (Purposive Sampling)* adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.

Fakta menunjukkan Dari Hasil Riset, Kenapa Memilih *Nonprobability Sampling*? Karena Penduduk yang berprofesi sebagai nelayan tidak tercatat di BPS.

3.5 Sumber Data

Adapun yang di maksud sumber data dalam penelitian adalah subjek di mana data di peroleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat di bagi dalam dua bagian. (Suharsimi Arikunto, 2010)

- a. Data primer : Data yang di peroleh dengan wawancara langsung kepada responden, kepada nelayan di Kecamatan Medan Belawan.
- b. Data Skunder : Data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan 2 cara yaitu secara sekunder dan primer, sebagai berikut :

1. Sekunder

Pengambilan data secara sekunder yaitu Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan teori dengan cara mempelajari literature seperti buku-buku, jurnal penelitian dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian

2. Primer

Pengambilan data secara primer yaitu dengan cara wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif, analisis deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh baik secara presentase, maupun dari grafik.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Geografi dan Demografi

4.1.1 Kondisi Geografis

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, di bandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3°30' - 3°43' Lintang Utara dan 98°35' - 98°44' Bujur Timur. Untuk itu topografi Kota Medan cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Selat Malaka
- b. Selatan : Kecamatan Deli Tua dan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang
- c. Barat : Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
- d. Timur : Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang

Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu sungai Babura dan sungai Deli. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut stasiun Polonia pada tahun 2011 berkisar antara 23,2°C - 24,2°C dengan suhu maksimum berkisar antara 31,6°C - 35,8°C dan suhu maksimum berkisar 29,1°C - 32,9°C.

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kota Medan



Sumber : Medan kota dalam angka tahun 2017

4.1.2. Kondisi Topografi dan Demografis

Topografi Kota Medan cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5 – 37,5 meter diatas permukaan laut. Dari luas wilayah Kota Medan dapat dipersentasekan sebagai berikut:

- a. Pemukiman 36,3%

- b. Perkebunan 3,1%
- c. Lahan Jasa 1,9%
- d. Sawah 6,1%
- e. Perusahaan 4,2%
- f. Kebun Campuran 45,4%
- g. Industri 1,5%
- h. Hutan Rawa 1,8%.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Medan Tuntungan	85.613
2.	Medan Johor	132.012
3.	Medan Amplas	123.850
4.	Medan Denai	146.061
5.	Medan Area	98.992
6.	Medan Kota	74.439
7.	Medan Maimun	40.663
8.	Medan Polonia	55.949
9.	Medan Baru	40.540
10.	Medan Selayang	106.150
11.	Medan Sunggal	115.785
12.	Medan Helvetia	150.721
13.	Medan Petisah	63.374
14.	Medan Barat	72.683

15.	Medan Timur	111.420
16.	Medan Perjuangan	95.882
17.	Medan Tembung	137.178
18.	Medan Deli	181.460
19.	Medan Labuhan	117.472
20.	Medan Marelan	162.267
21.	Medan Belawan	98.113
	TOTAL	2.210.624

Sumber : Data BPS Kota Medan

Dari data statistik diatas, pada tahun 2015 diperkirakan jumlah penduduk Kota Medan mencapai lebih dari 2,2 jiwa. Sebaran penduduk di tiap kecamatan cukup merata dengan sebaran rata – rata 5%. Kecamatan Medan Deli memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 181.460 jiwa. Sedangkan penduduk terkecil berada kecamatan Medan Baru.

4.1.3 Letak Geografis Kecamatan Medan Belawan

Kecamatan Medan Belawan berbatasan langsung dengan selat malaka di sebelah utara, kecamatan Medan Labuhan di sebelah selatan, kabupaten Deli Serdang di sebelah barat dan di sebelah timur. Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang mempunyai luas sekitar 21,82 km². Jarak kantor kecamatan ke kantor walikota Medan yaitu sekitar 23 km.

Dari 6 kelurahan di kecamatan Medan Belawan, kelurahan Belawan Pulau Sicanang memiliki luas wilayah yang terluas yaitu sebesar 15,10 km²sedangkan kelurahan Belawan Bahagia mempunyai luas terkecil yakni 0,54 km².

Kecamatan Medan Belawan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Barat** berbatasan dengan Kab. Deli Serdang
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan Kab. Deli Serdang
- **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kecamatan Medan Labuhan
- **Sebelah Utara** berbatasan dengan Selat Malaka

Di Kecamatan Medan Belawan ini terdapat Pelabuhan Belawan yang merupakan pelabuhan terbuka untuk perdagangan internasional, regional dan nasional. Pelabuhan Belawan ini merupakan urat nadi perekonomian Sumatera Utara khususnya arus keluar masuk barang dan penumpang melalui angkutan laut, sehingga Kota Medan dikenal dengan pintu gerbang Indonesia bagian Barat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Struktur Ekonomi Kota Medan

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan jumlah produksi yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang merupakan suatu gambaran tingkat perubahan ekonomi suatu daerah. Bagi suatu daerah hal ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang dicapai dan dapat digunakan sebagai alat menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan daerah tersebut, terjadinya pertumbuhan PDRB suatu daerah dapat disebabkan dari meningkatnya kontribusi salah satu subsektor

yang ada pada daerah tersebut. Berikut ini PDRB Kota Medan atas dasar harga konstan dari tahun 2013 sampai 2017:

Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Medan (juta rupiah), 2013–2018

Lapangan usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1582046.6	1790721.3	1999171.09	2269060.75	2537461.34	2752772.58
Pertambangan dan Penggalian	2469.6	2402.3	2349.4	2403.8	2306.86	2374.34
Industri Pengolahan	21681108.9	23996025.5	25565997.4	27719511.24	30133931.45	32497416.37
Pengadaan Listrik dan Gas	165732	172296.83	149185	160872.2	194621.6	211137.13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	229273	260168.3	301299	345705.8	400651.59	435601.68
Konstruksi	23229959.69	27196308.99	30608286.2	35026070.8	39045126.48	42986701.5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31360899.4	36363790.1	40787434.9	45907066.42	50034464.02	55538093.77
Transportasi dan Pergudangan	10512653.8	9709408.1	10493242.5	11713716.87	12894447.67	13972799.1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3619627.5	4357450.9	5052908.7	5718194.23	6233068.4	6730284.22
Informasi dan Komunikasi	6776710.2	7401844.7	8105812.3	9206951.08	10362863.45	11403891.04
Jasa Keuangan dan Asuransi	9827560.2	10878922.9	11968374.9	12998990.65	13546809.15	14266852.04
Real Estat	10306414.4	11906215.7	13643390.8	15543390.8	17790131.56	19850137.37
Jasa Perusahaan	3169678.8	3622950.3	4051891.5	4700540.68	5254705.46	5758765.7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2482795.6	2822970	3172216	3449187.49	3709240.21	4051872.67
Jasa Pendidikan	3560104.4	4076433.2	4485244.2	4975731.06	5225326.47	5688748.2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1729980.1	2097361.7	2526069	2965514.29	3292292.93	3741257.42
Jasa lainnya	1367630.2	1592050.8	1808952.5	2106128.45	2358900.88	2593716.97
PDRB	131604644.4	148247321.6	164721825.4	184809036.6	203016349.5	222482422.1

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2018 (www.medankota.bps.go.id)

Dari tabel PDRB Kota Medan tersebut, dapat kita lihat terjadi kenaikan setiap tahunnya selama periode 3 tahun terakhir. Pada tahun 2016 jumlahnya adalah Rp. 184809036.6 juta dan meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp. 203016349.5 juta dan terus meningkat hingga tahun 2018 sebesar Rp.

222482422.1 juta Sektor yang paling tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota Medan selama 3 tahun terakhir adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2018 dengan memberikan sebesar Rp. 55538093.77 juta. Dari sektor tersebut kontribusi terbesar mengalami kenaikan setiap tahunnya selama periode 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena Kota Medan Perkembangan ini didukung dengan perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis *online*. “Bisnis *online* yang turut memberikan andil dalam meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Medan beberapa tahun terakhir. Kemudian sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi adalah Pertambangan dan Penggalan pada tahun 2018 menyumbang sebesar Rp. 2374.34 juta. Pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang terus meningkat dari tahun 2016 sampai 2018 terus mengalami kenaikan, hingga tahun 2018 sebesar Rp. 2752772.58 juta.

4.2.2 Produksi Perikanan Tangkap Kota Medan

Konsep pengelolaan minapolitan perikanan tangkap didasarkan pada konsep membangun sistem pengelolaan perikanan tangkap yang berbasis pada kemudahan nelayan bekerja dan memotivasi mereka untuk meningkatkan pendapatan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Di samping itu, juga memberikan kemudahan nelayan dalam bekerja dengan penyediaan sarana dan prasarana (pelabuhan perikanan, galangan kapal, bengkel, SPDN/SPBN, unit pengolahan ikan, pabrik es dan unit pemasaran) di sentra-sentra nelayan, penyederhanaan perijinan dan penyediaan permodalan (KKP 2010).

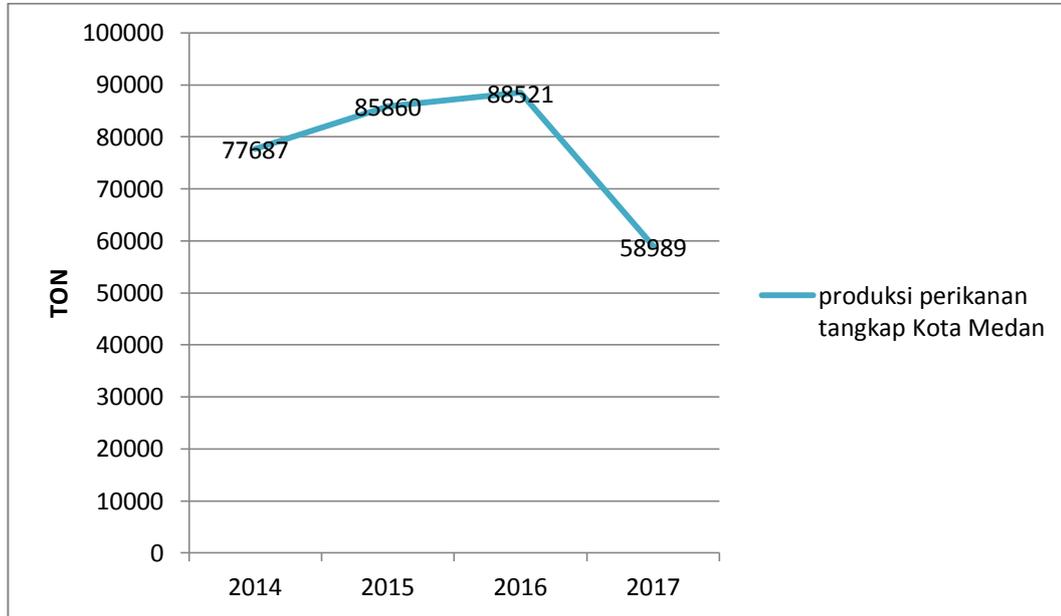
Pelaksanaan konsep minapolitan harus disesuaikan dengan tujuannya, yaitu peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi daerah. Terkait dengan minapolitan perikanan tangkap (KKP 2011), paket-paket kegiatan perikanan tangkap sekurang-kurangnya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Komoditas unggulan dan target produksi;
- 2) Distribusi wilayah penangkapan pro nelayan;
- 3) Struktur armada nasional;
- 4) Sistem pengkayaan stok, moratorium, dan peningkatan produksi;
- 5) Sistem pelayanan perijinan;
- 6) Sistem pengelolaan pelabuhan perikanan dan TPI efisien pro nelayan;
- 7) Sistem insentif usaha dan investasi;
- 8) Teknologi penangkapan dan penanganan ikan di atas kapal;
- 9) Bantuan teknis, seperti sarana dan permodalan serta pendampingan; dan
- 10) Pembangunan prasarana.

Kecamatan Medan Belawan telah ditetapkan oleh keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 35 /kepmen-kp/2013 sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap, daerah tersebut merupakan pusat produksi perikanan tangkap dan mewakili karakteristik perikanan tangkap di Indonesia. Dengan adanya kebijakan minapolitan perikanan tangkap tersebut yang telah ditetapkan kementerian kelautan perikanan (KKP) tahun 2011 tentu akan sangat membantu masyarakat Kecamatan Medan Belawan yang berprofesi sebagai nelayan tradisional. Karena dasar dari kegiatan-kegiatan minapolitan untuk

perikanan tangkap tersebut yaitu meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi daerah.

Gambar 4.2 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Di Kota Medan



Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2017 (www.medankota.bps.go.id)

Dilihat dari gambar grafik di atas bisa dilihat perkembangan produksi perikanan tangkap di Kota Medan dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2014 produksi perikanan tangkap Kota Medan sejumlah 77,687 ton dan pada tahun 2015 produksi perikanan tangkap di Kota Medan mengalami peningkatan yaitu berjumlah 85,860 ton dan pada tahun 2016 produksi perikanan tangkap masih terus mengalami peningkatan yaitu berjumlah 88,521 ton dan pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap di Kota Medan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu berjumlah 58,989 ton. Penurunan dari produksi perikanan tangkap ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap PDRB kota medan.

Dilihat dari data di atas bisa di asumsikan bahwa dengan adanya penurunan produksi perikanan tangkap di Kota Medan, berarti masih kurangnya perhatian pemerintah kota medan terhadap nelayan nelayan di Kota Medan.

4.2.3 Deskriptif Objek Penelitian

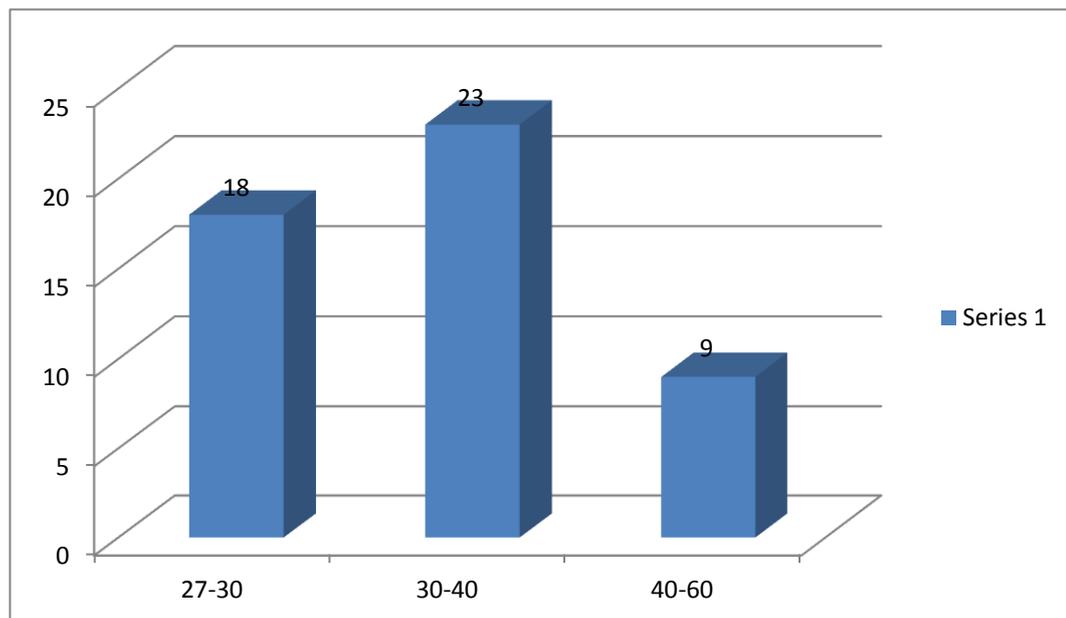
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada 50 nelayan di Kecamatan Medan Belawan. Daftar Pertanyaan yang disusun langsung kepada peserta melalui kuesioner wawancara.

A. Nelayan Berdasarkan Usia

Berdasarkan data yang diperoleh pada 50 responden nelayan di Kecamatan Medan Belawan. Usia nelayan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 27-60 tahun adalah sebagai berikut.

Gambar 4.3

Karakteristik Nelayan Berdasarkan Usia



Sumber :Diolah Oleh Penulis

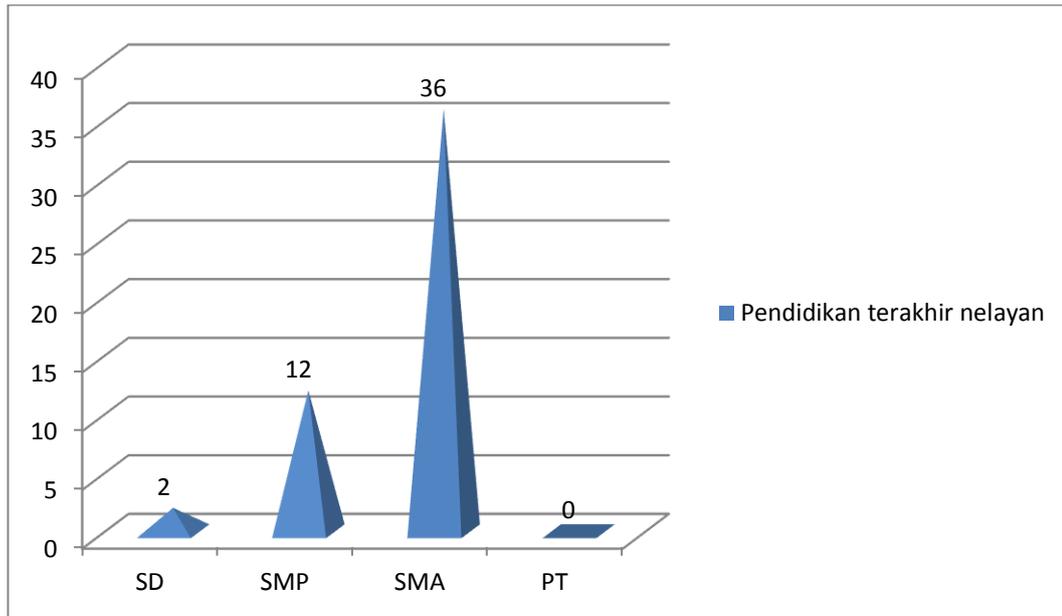
Dilihat dari usia nelayan yang menjadi responden usia 30-40 tahun paling dominan dalam penelitian ini yaitu sebanyak (46%) 23 orang, selanjutnya pada

tingkat kedua Nelayan pada usia 27-30 tahun sebanyak (36%) 18 orang dan ke tiga yaitu pada usia 40-60 tahun sebanyak (18%) 9 orang.

B. Karakteristik Nelayan Berdasarkan Pendidikan

Gambar 4.4

Karakteristik Nelayan Berdasarkan Pendidikan



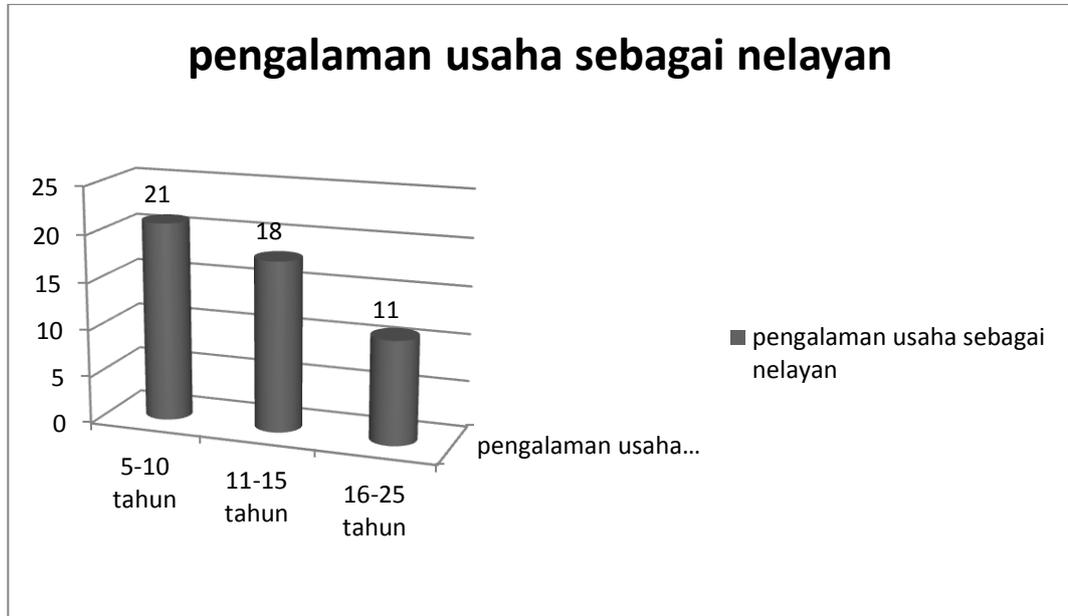
Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang telah disajikan pada diagram dapat kita ketahui bahwa Nelayan yang menjadi responden yang hanya selesai pendidikan SD ada 2 orang (4 %) dan yang hanya selesai pendidikan SMP ada 12 orang (24 %) dan yang tamat sampai jenjang SMA ada 36 orang (72%) dan yang sampai jenjang perguruan tinggi tidak ada sama sekali (0%) hal ini dikarenakan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu dan pada umumnya mereka sudah terbiasa bekerja dari kecil untuk membantu orang tua yang juga berprofesi sebagai nelayan juga.

C. Karakteristik Nelayan Berdasarkan Pengalaman Usaha Sebagai Nelayan

Gambar 4.5

Karakteristik Nelayan Berdasarkan Pengalaman Usaha



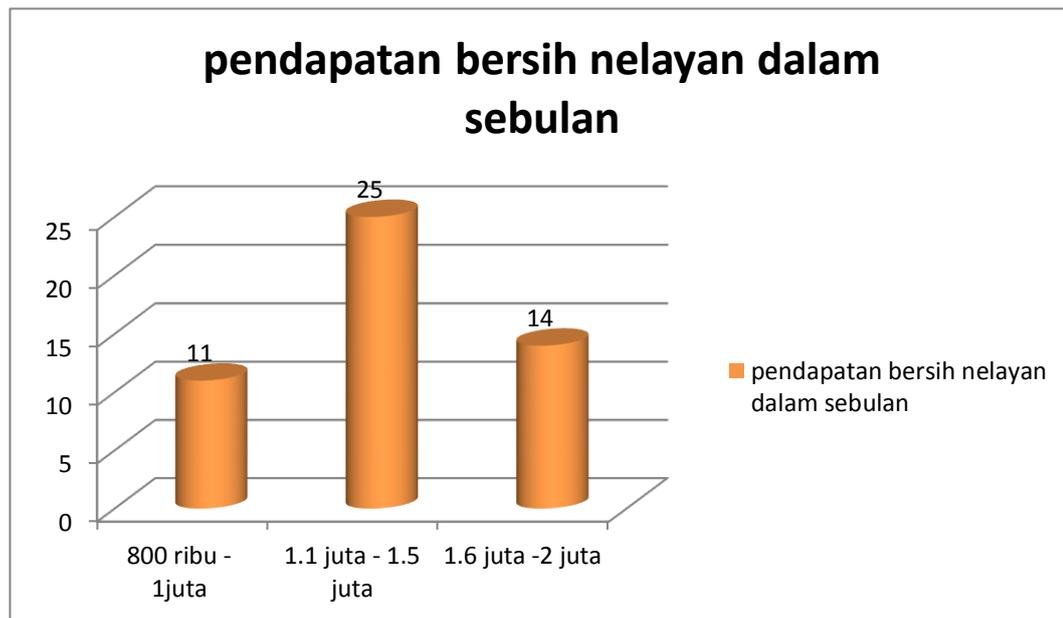
Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang telah disajikan pada diagram dapat kita ketahui bahwa Nelayan yang menjadi responden yang pengalaman usaha sebagai nelayan 5-10 tahun ada 21 orang (42%) dan pengalam usaha 11-15 tahun ada 18 orang (36%) dan pengalaman usaha 16-25 tahun ada 11 orang (22%).

4.2.4 Deskriptif Kegiatan Usaha Nelayan

A. Penghasilan Bersih Rata Rata Nelayan Dalam Satu Bulan.

Gambar 4.6



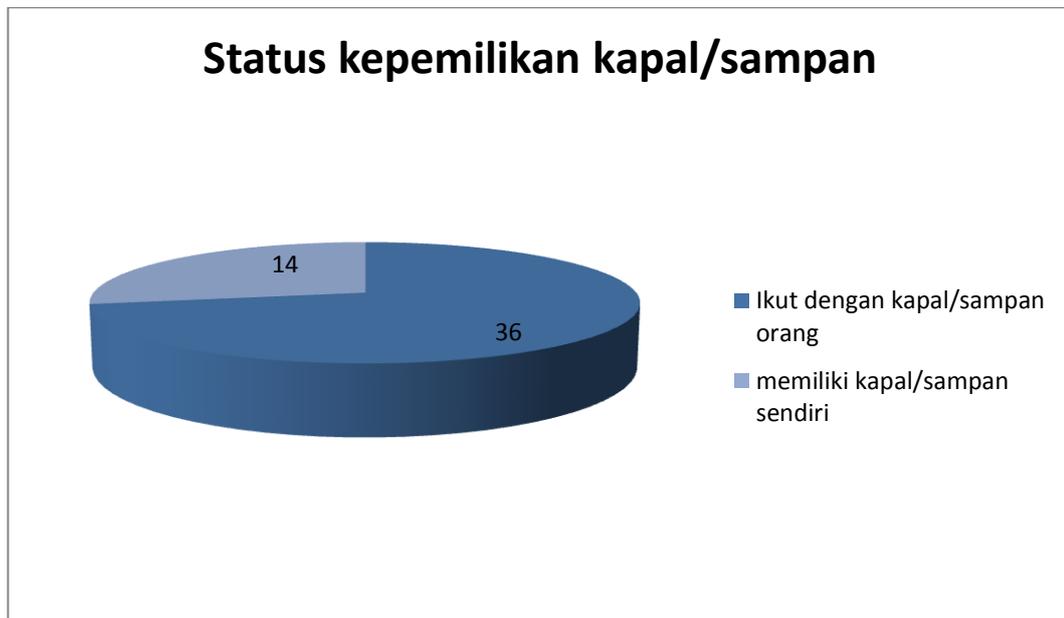
Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang telah disajikan pada diagram dapat kita ketahui bahwa Nelayan yang menjadi responden mempunyai pendapatan antara 800 ribu samapai 1 juta ada 11 orang (22%), nelayan yang memiliki pendapatan antara 1,1 juta sampai !,5 juta ada 25 orang dan nelayan yang memiliki pendapatan antara 1,6 juta sampai 2 juta ada 14 orang. Pendapatan ini ialah pendapatan bersih yang diperoleh oleh nelayan setelah di kurangi semua total biaya untuk melaut. Penghasilan nelayan relatif kecil karena kebanyakan nelayan hanya ikut dengan kapal seseorang dan pembagian hasil tergantung dari sang pemilik kapal dan penghasilan tentu di kurangi biaya untuk kebutuhan operasional ketika menangkap ikan.

B. Kegiatan Usaha Nelayan Berdasarkan Kepemilikan Kapal / Sampan

Gambar 4.7

**Nelayan Yang Ikut Sampan / Kapal Orang Lain Dan Nelayan Yang
Memiliki Sampan / Kapal sendiri**



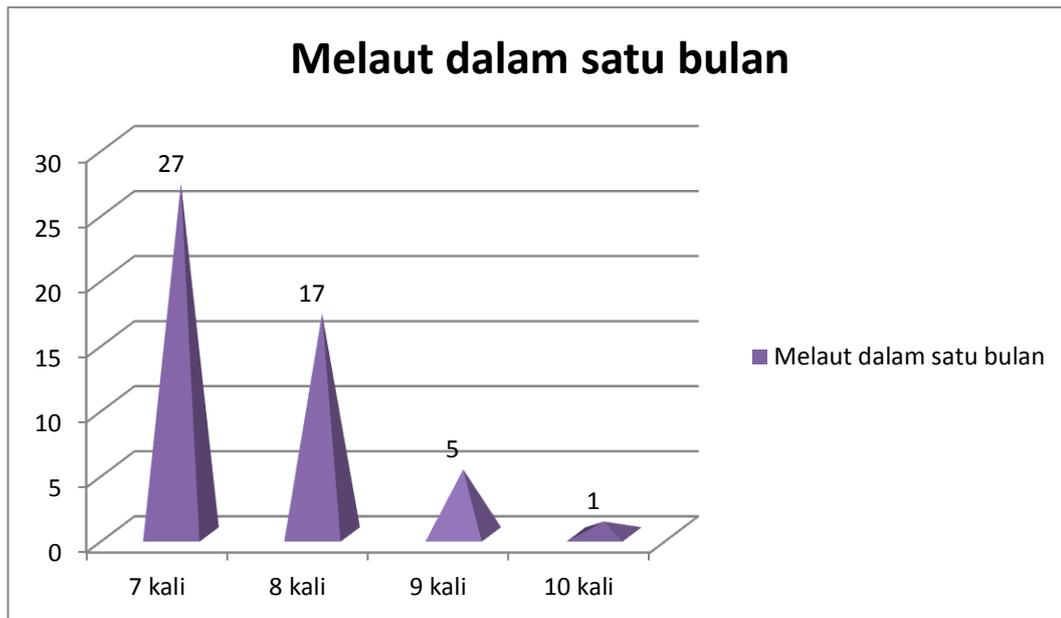
Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang telah disajikan pada diagram dapat kita ketahui bahwa Nelayan yang menajadi responden 72 % nelayan hanya bekerja sebagai nelayan dengan menggunakan atau mengikuti kapal/sampan milik orang lain dan hanya 28 % nelayan yang memiliki kapal/sampan sendiri. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh para nelayan, karena dengan ikut seseorang pasti pembagian dalam hasil tangkapan akan bergantung dengan sang pemilik kapal.

C. Nelayan Melaut Dalam Satu Bulan

Gambar 4.8

Nelayan Melaut Dalam 1 bulan



Sumber :Diolah Oleh Penulis

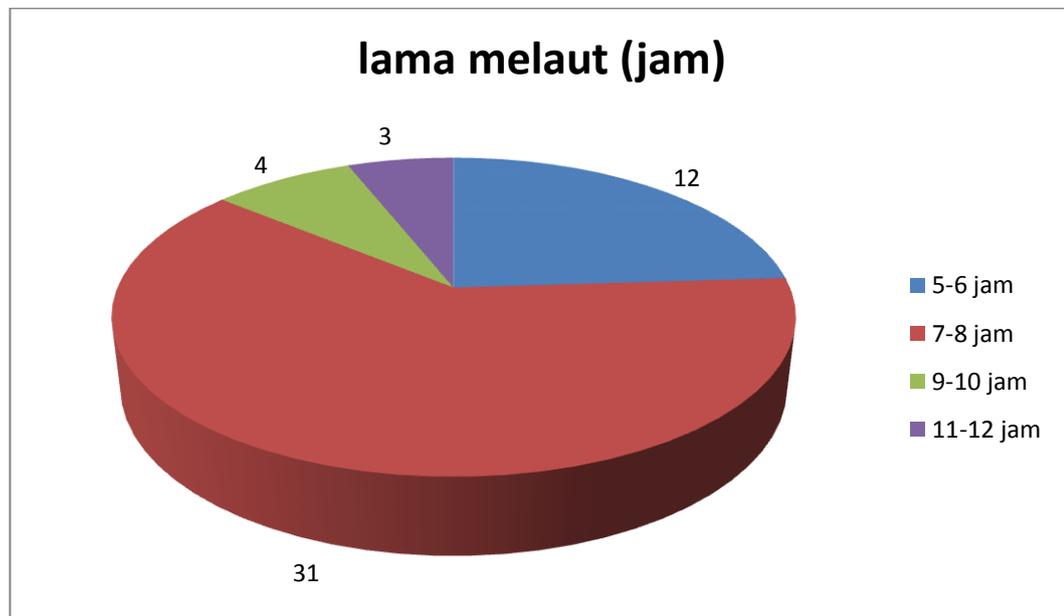
Berdasarkan data yang telah disajikan pada diagram dapat kita ketahui bahwa Nelayan yang menjadi responden dalam satu bulan kebanyakan mereka melaut dalam satu bulan 7 kali dan yang paling melaut sampai 10 kali dalam satu bulan hanya ada 1 orang, nelayan yang melaut 7 kali dalam satu bulan ada 27 nelayan dan yang melaut 8 kali dalam satu bulan ada 17 orang, nelayan yang melaut 9 kali dalam satu bulan ada 5 orang dan yang melaut 10 kali dalam satu bulan ada 1 orang saja.

Berapa kali melaut dalam sebulan kebanyakan nelayan hanya bergantung kepada pemilik kapal dan hanya bisa mengikuti sang pemilik kapal, dan faktor yang paling berpengaruh ialah permodalan, persiapan untuk kembali melaut. Perlu jeda waktu untuk menyiapkan kembali alat-alat dan perlengkapan yang lain untuk kembali melaut.

D. Lama Melaut Dalam Satu Trip (Jam)

Gambar 4.9

Lama Melaut Nelayan Dalam Satu Trip



Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang telah disajikan pada diagram dapat kita ketahui bahwa Nelayan yang menjadi responden dalam satu trip menghabiskan waktu untuk menangkap ikan rata rata 7-8 jam sekali trip penangkapan ikan, yaitu berjumlah 62 % dan yang menghabiskan waktu 5-6 jam dalam sekali trip ada 24 % dan yang menghabiskan waktu 9-10 jam sekali trip ada 8 % dan yang menghabiskan wakti 11-12 jam dalam sekali trip ada 6 %. Rata-rata nelayan berangkat melaut pada jam malam yaitu berangkat jam 10 malam dan sampai ke tempat bongkar muat hasil tangkapan jam 6 pagi.

E. Menjual Hasil Tangkapan

Gambar 4.10
Menjual Hasil Tangkapan



Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang telah disajikan pada diagram dapat kita ketahui bahwa Nelayan yang menjadi responden penjualan hasil tangkapan mereka semuanya menjawab hasil tangkapan di jual langsung kepada penampung / toke langganan masing- masing.

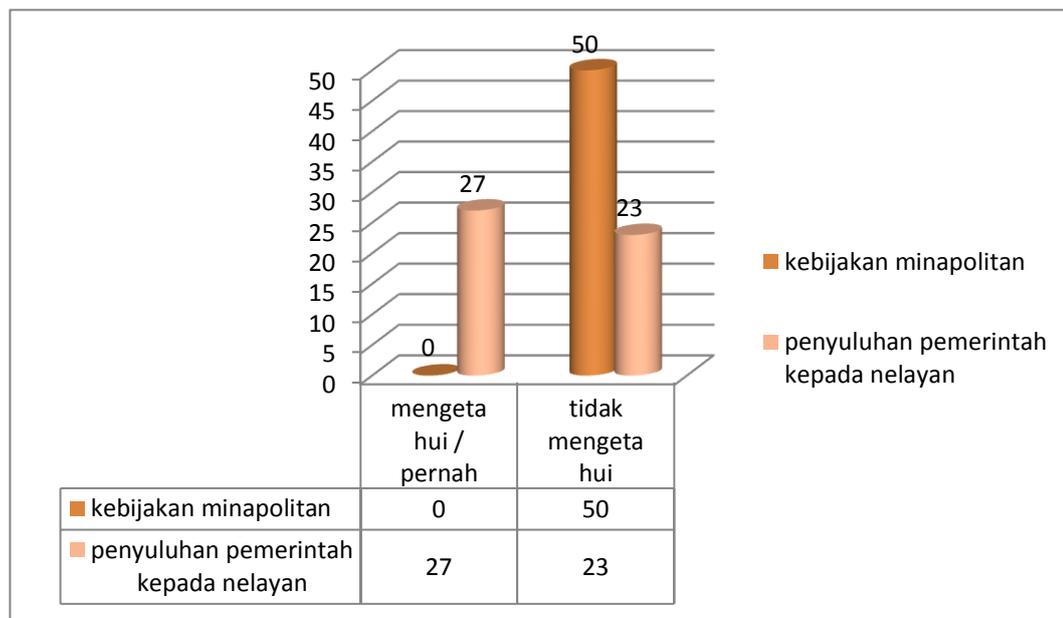
Hal ini mereka katakan karena tentu saja lebih mudah atau lebih efisien, karena pada dasarnya nelayan dan penampung / toke sudah mengetahui harga pasaran dari hasil tangkapan.

4.2.4 Deskriptif Kebijakan Minapolitan Terhadap Nelayan.

A. Pengetahuan Nelayan Tentang Minapolitan Dan Penyuluhan Pemerintah

Gambar 4.11

Pengetahuan Nelayan Tentang Kebijakan Minapolitan



Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang saya peroleh dari nelayan yang menjadi responden, semua responden menjawab tidak mengetahui apa itu kebijakan minapolitan dan alasan mereka kebanyakan “ memang tidak pernah mendengar tentang itu “. Dan 54 % nelayan yang menjadi responden pernah mengikuti penyuluhan yang diberikan pemerintah tentang nelayan dan 46 % lagi tidak pernah mengikuti penyuluhan sama sekali. Nelayan yang tidak pernah mengikuti penyuluhan mengaku malas mengikuti penyuluhan yang dilakukan pemerintah dan dengan alasan lebih baik mendengar kabar dari teman-teman nelayan yang lain.

Penyuluhan yang dilakukan pemerintah terhadap nelayan tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan minapolitan, penyuluhan yang dilakukan

pemerintah ialah tentang kebijakan pemerintah bahwa tidak boleh di gunakannya lagi alat tangkap cantrang, cantrang ialah bekerja dengan cara menyapu seluruh dasar lautan, karena cantrang menangkap ikan demersal (ikan dasar). Oleh karena itu, cantrang dianggap berpotensi dapat merusak ekosistem substrat tempat tumbuhnya organism atau jasad renik yang menjadi makanan ikan dan juga merusak terumbu karang, Penggunaan cantrang dapat menyebabkan rusaknya dasar lautan dan ekosistem lautan. Hasil tangkapan cantrang tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran biota laut, sehingga akan mengganggu proses recruitment dan mengancam keberlanjutan sumberdaya. Selain itu juga penggunaan Cantrang akan terus menimbulkan konflik horizontal dengan nelayan yang tidak menggunakan Cantrang.

Kebijakan pelarangan cantrang sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang teruji. Tahun 1980 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No 39 Tahun 1980 yang menginstruksikan untuk melarang penggunaan jaring Trawl. Tahun 1997 Cantrang diperbolehkan untuk nelayan kecil dengan ukuran kapal maksimal 5 GT dan mesin maksima 115 PK. Dalam perkembangan fakta lapangan banyak alat tangkap yang dimodifikasi, sehingga alat penangkapan ikan (API) harus mengacu kepada salah satu kelompok jenis API.

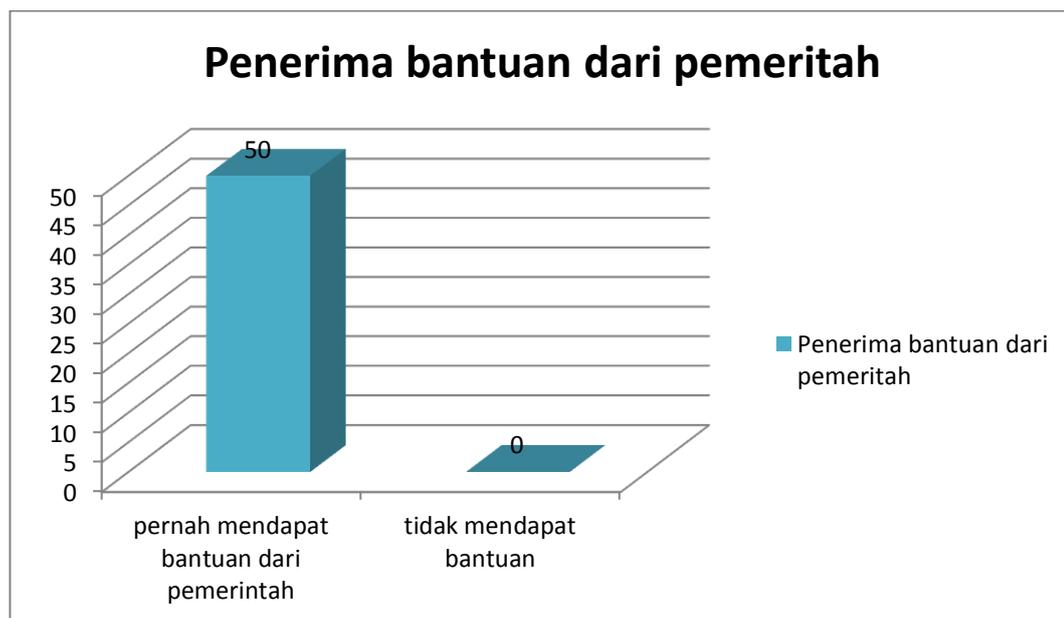
Selain itu juga fakta dilapangan menunjukkan bahwa kapal-kapal Cantrang banyak yang melakukan Markdown, kapal cantrang dengan ukuran 85 GT. Akibatnya tahun 2015 negara mengalami kerugian yang mencapai 10,44 T. Kerugian tersebut bersumber dari 3 komponen utama, yaitu kehilangan PNBP sebesar 328,41 M, penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kapal nelayan sebesar

280,09 M dan deplesi sumberdaya ikan sebesar 9,83 Triliun. Tahun 2015 API cantrang dilarang dioperasikan di seluruh WPP-NRI. Masa tenggang untuk pengalihan ke alat tangkap lainnya diberikan sampai Juli 2017.

Namun dari tahun ditetapkannya pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, semua nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang masih menggunakannya. Dengan alasan tidak ada modal untuk mengganti alat tangkap model lain, dan alasan yang lain ialah karena penggunaan alat tangkap cantrang lebih produktif karena lebih banyak menghasilkan tangkapan ikan.

B. Bantuan Dan Sarana Yang Diberikan Oleh Pemerintah

Gambar 4.12



Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang saya peroleh dari nelayan yang menjadi responden, semua responden pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, Bantuan tersebut ialah berupa premi asuransi nelayan. Bantuan Premi Asuransi Nelayan Dengan

nilai manfaat per orang berupa santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan sejumlah Rp 200.000.000 apabila menyebabkan kematian, Rp 100.000.000 apabila menyebabkan cacat tetap, dan Rp 20.000.000 untuk biaya pengobatan. Sementara untuk santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, diberikan manfaat perorang sejumlah Rp 160.000.000 apabila menyebabkan kematian (termasuk kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami), Rp 100.000.000 untuk yang mengalami cacat tetap, dan biaya pengobatan sebesar Rp 20.000.000.

Hampir rata rata nelayan sudah terdaftar untuk bantuan premi asuransi nelayan, syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut Adapun calon penerima bantuan asuransi nelayan merupakan nelayan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki kartu nelayan, berusia maksimal 65 tahun, menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah Sejak digulirkan.

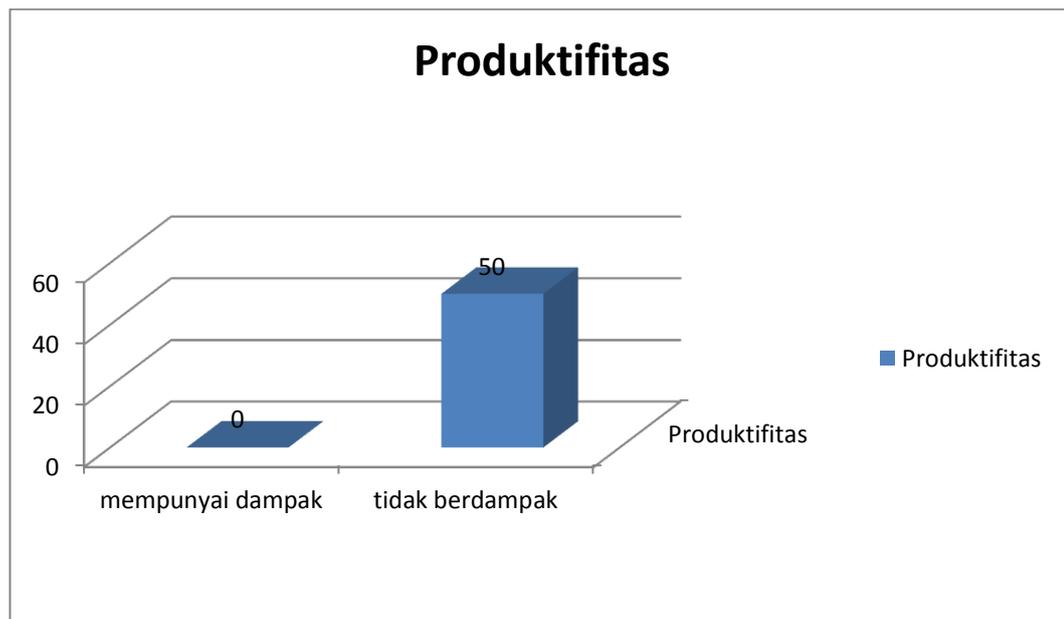
Dan bantuan lain yang diterima oleh responden ialah berupa alat tangkap gill net, dan nelayan yang mendapatkan bantuan tersebut ialah nelayan yang dahulunya menggunakan alat tangkap cantrang yang sudah di larang oleh pemerintah, bantuan tersebut diberikan pada awal tahun 2017. Alat tangkap gill net merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan karena alat tangkap gill net menangkap ikan dengan target spesifik atau tepat sasaran.

Bantuan lain yang ditawarkan kepada nelayan yaitu KKP telah bekerja sama dengan perbankan untuk memfasilitasi nelayan dalam meningkatkan produktifitas para nelayan. Tetapi karena proses yang sangat berbelit untuk

mendapatkan bantuan tersebut dari bank jadi hanya beberapa nelayan saja yang berhasil melakukan pinjaman tersebut.

C. Dampak Bantuan Pemerintah Terhadap Produktifitas Nelayan

Gambar 4.13



Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang diperoleh dari nelayan yang menjadi responden, bantuan yang diterima dari pemerintah semuanya menjawab tidak berdampak langsung terhadap produktifitas mereka dalam ber nelayan, karena bantuan yang mereka tidak ada yang berdampak langsung terhadap produktifitas mereka, bantuan yang diterima hanya berupa asuransi saja dan adapun bantuan alat tangkap yang diberikan pemerintah yaitu alat tangkap gill net, alat tangkap tersebut hanya bantuan yang diterima karena alat tangkap nelayan yang digunakan yaitu alat tangkap cantrang yang dilarang pemerintah penggunaanya.

Dan alat tangkap gill net tersebut bisa dibilang sangat tidak pro nelayan kecil, karena alat tangkap tersebut tidak cocok dengan nelayan yang penangkapan

ikan yang hanya di perairan dangkal, alat tangkap tersebut hanya cocok untuk nelayan-nelayan dengan kapal besar yang memiliki jangkauan ke perairan dalam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perkembangan sektor perikanan di Kota Medan pada perikanan tangkap mengalami penurunan, pada tahun 2014 jumlah produksi perikanan tangkap Kota Medan sejumlah 77,687 ton dan pada tahun 2015 produksi perikanan tangkap di Kota Medan mengalami peningkatan yaitu berjumlah 85,860 ton dan pada tahun 2016 produksi perikanan tangkap masih terus mengalami peningkatan yaitu berjumlah 88,521 ton dan pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap di Kota Medan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu berjumlah 58,989 ton. Penurunan ini mungkin disebabkan karena pelarangan alat tangkap cantrang yang tidak boleh di pergunakan lagi pada awal tahun 2017, diubahnya dengan menjadi alat tangkap gill net yang menurut para nelayan sangat tidak efisien untuk para nelayan yang menangkap ikan di perairan dangkal.
2. Tidak tahunya para nelayan tentang kebijakan minapolitan karena tidak ada penyuluhan terhadap nelayan tentang kebijakan tersebut.
3. Para nelayan telah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa premi asuransi nelayan dan alat tangkap gill net, tetapi dalam bantuan tersebut nelayan merasa bantuan tersebut tidak ada pengaruh dalam

meningkatkan produktifitas mereka dalam pekerjaan mereka sebagai nelayan, bantuan alat tangkap tersebut hanya pengganti dari alat tangkap mereka yang sebelumnya yang dilarang oleh pemerintah.

4. Bantuan yang lain yaitu adanya kerja sama kementerian kelautan perikanan dengan BRI untuk bisa memberikan modal terhadap para nelayan tetapi nelayan merasa melakukan pinjaman tersebut seperti di persulit dan berbelit belit.
5. Kebijakan minapolitan untuk perikanan tangkap di Kecamatan Medan Belawan masih belum terealisasi, karena tidak ada nelayan yang merasa bantuan tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak pro untuk nelayan kecil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang di dapat, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu :

1. Perlunya pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan minapolitan untuk perikanan tangkap terhadap nelayan karena sampai sekarang masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan belum merasakan dampak dari kebijakan tersebut yang sudah dikeluarkan pada tahun 2013 lalu.
2. Diharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan agar lebih pro terhadap nelayan-nelayan kecil, dan diharapkan supaya dipermudahnya peminjaman dana kepada bank untuk para nelayan agar prosesnya tidak berbelit belit supaya dapat meningkatkan produktifitas mereka dalam bernelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad L, (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi Daerah*.
Yogyakarta
- Administrator. (2016). *Lima Kota Dengan Konsep Water Front City Terbaik Di
Indonesia*. pemkomedan.go.id
- Badan Pusat Statistik Indonesia 2017 Poduski perikanan tangkap Sumatera Utara
www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik Medan Kota 2017 jumlah penduduk miskin di kota medan
www.medankota.bps.go.id
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2006). *Panduan
Teknis Perencanaan Tata Ruang Wilayah Peisisir dan Laut, Merupakan
Jabaran Teknis Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 34 Tahhun 2002
Tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.
Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan
- Drs. Robinson Tarigan, M.R.P *Ekonomi Regional teori dan Aplikasi* Jakarta:
Penerbit PT Gramedia
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2003). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Penerbit
PT Gramedia
- Faruk, Fahrulraz M. (2017). *Refleksi Indonesia Sebagai Negara Maritim*.
Geotimes.co.id

- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta :
Rajawali Press
- Katadata.co.id (2018) *pertumbuhan PDB Sector Perikanan*.
- Kementrian kelautan perikanan (KKP) keputusan menteri kelautan dan perikanan
republik indonesia nomor 35 /kepmen-kp/2013.
- Kuncoro, Mudrajat. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator
Ekonomi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit
Erlangga. Jakarta.
- Mulyadi. (2005). *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rahardja, Pratama dan Mandalla Manurung. (2008). *Teori Ekonomi Makro Suatu
Pengantar*. Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia.
- Somba, Henry Roy. (2014). *Konsep WaterFront City. Solusi Mengelolah
Bantaran Sungai*. Sulawesi Utara
- Todaro, Michael P dan Smith Stephen C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi
Kesebelas. Jakarta. Penerbit Erlangga,
- Wandoka, Sarbia. (2012). *Kawasan Minapolitan Sebagai Sistem Produksi
Perikanan*. Ambon

Jurnal :

Adhihapsari, Wirastika. Semedi, Bambang. Mahmudi, M. (2014). *Perencanaan Pengembangan Wilayah Kawasan Minapolitan Budidaya di Gandusari Kabupaten Blitar*. Mahasiswa Program Pascasarjana FPIK Universitas Brawijaya. J-PAL, Vol. 5, No. 2

Baruadi, Alfi Sahri R. Simbolon, Domu. Yusfiandayani, R. (2012). *Model Pengembangan Perikanan Tangkap Berbasis Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara*. Universitas Negeri Gorontalo. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. Vol. 3. No. 1

Cahya, Darmawan L dan Mahreza, Muhammad D. (2013). *Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan*. Universitas Esa Unggul. Jurnal Planesa Volume 4, Nomer 2